

# ENVIRONMENTAL DISCLOSURE TEORI DAN RISET

Buku yang berjudul “ENVIRONMENTAL DISCLOSURE TEORI DAN RISET” ini berusaha memberikan sumbangsih pada pengembangan Akuntansi Manajemen Lingkungan di bidang akademik dan praktis. Buku ini menawarkan pengetahuan mengenai environmental disclosure dan berbagai elemen yang dapat memperkuat keberadaannya dalam sebuah perusahaan serta didukung dengan hasil penelitian di setiap elemen. Pengetahuan environmental disclosure dimulai dari pengenalan teori-teori dan urgensinya pada perusahaan. Kemudian, pembahasan selanjutnya membahas mengenai elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan environmental disclosure yaitu Kinerja Keuangan, Environmental Cost Disclosure, Tata Kelola Perusahaan, Kepemilikan Pemerintah, Environmental Management Accounting, Tekanan Institusi, dan Shareholders Value. Para akademisi, mahasiswa, serta pelaku usaha dapat menjadikan literatur ini sebagai kajian komprehensif dalam membaca dinamika degradasi lingkungan dari sisi bisnis dan akademik.



Published by:  
IRDH (International Research and Development for Human Beings)  
(Anggota IKAPI) No 159-JTE-2017  
Office :  
Jl. Sokajaya 59, Purwokerto  
Perum New Villa Bukit Sengkaling C9 No. 1. Malang.  
☎ 081 357 217 319    📞 089 621 424 412  
🌐 www.irdhcenter.com    ✉ buku.irdh@gmail.com



Luluk Muhimatul Ifada  
ENVIRONMENTAL DISCLOSURE TEORI DAN RISET 2022

# ENVIRONMENTAL DISCLOSURE TEORI DAN RISET



Luluk Muhimatul Ifada

**ENVIRONMENTAL DISCLOSURE  
TEORI DAN RISET**

**Dr. Luluk Muhimatul Ifada, S.E., M.Si.,  
Akt., CSRS., CSRA.**

**CV. IRDH**

# **ENVIRONMENTAL DISCLOSURE TEORI DAN RISET**

Penulis : Dr. Luluk Muhimatul Ifada, S.E, M.Si,Akt, CSRS,CSRA  
Editor : Cakti Indra Gunawan, Ph.D.  
Penata Letak : Kamila Munna, S.Si.  
Pracetak dan Produksi : Dito Aditia, S.Pi.  
Perancang Sampul : Muhamad Usman Efendi

Hak Cipta © 2022, pada penulis

Hak publikasi pada CV IRDH

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama Desember, 2022

Penerbit CV IRDH

Anggota IKAPI No. 159-JTE-2017

Office: Jl. Sokajaya No. 59 Purwokerto

Perum New Villa Bukit Sengkaling C9 No. 1 Malang

HP : 0813 5721 7319, WA : 089 621 424 412

[www.irdhcenter.com](http://www.irdhcenter.com)

Email: [buku.irdh@gmail.com](mailto:buku.irdh@gmail.com)

e-ISBN : 978-623-375-044-8

ISBN : 978-623-375-040-0

i-xi + 104 hlm, 17,6 cm x 25 cm

## KATA SAMBUTAN

### *Sambutan Pertama,*

*Assalammualaikum Wr. Wb.*

*Bismillahirrohmanirrohiim*

Jika Anda belum mempelajari tentang peran bisnis dalam memelihara lingkungan, maka buku ini adalah salah satu pilihan untuk dibaca. Tidak hanya dibahas dari pendekatan teori, buku ini juga bisa menjadi panduan praktis bagaimana menjalankan bisnis yang pro dengan sustainabilitas lingkungan. Menariknya, buku ini mencakup semua topik yang relevan dan saling berhubungan, menjadikannya buku yang wajib dibaca tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran dalam situasi perkembangan bisnis yang tanpa disadari telah menumpuk masalah degradasi lingkungan.

Ketika saya diminta untuk menulis beberapa kata yang mencerminkan pemikiran saya tentang buku ini yang dikirimkan kepada saya, saya langsung merasakan semangat buku ini, bahkan hanya melihat daftar isi. Cakupan konten dan masalah yang dipilih dan sub-topik mencerminkan dengan baik intensitas pengetahuan dan paparan, serta intuisi penulis. Saya yakin buku ini akan berguna dan memberikan pengetahuan yang riil tentang pengetahuan teori *environmental disclosure* dan penggalian elemen-elemen penting pendukung implementasinya secara praktis.

Menyelesaikan buku ini pasti bukan sebuah tugas yang mudah, kecuali penulisnya memang sangat menguasai dan memiliki teknik artikulasi yang tepat dalam menjelaskan konsep-konsep. Akhirnya,

saya sangat senang dan bangga memberikan pengantar buku ini kepada para pembaca dan berharap pembaca akan mendapatkan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. *Insyah Allah* buku ini akan memberikan manfaat pada pihak-pihak praktisi bisnis, khususnya untuk meningkatkan frekuensi pada kepedulian lingkungan pada lingkup yang lebih luas. Semoga buku ini dapat mencapai sasarannya untuk implementasi akuntansi manajemen lingkungan di Indonesia.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

**Prof. Olivia Fachrunnisa, Ph.D**

Guru Besar Fakultas Ekonomi

UNISSULA

***Sambutan Kedua,***

*Assalammualaikum Wr. Wb.*

All praise is due to Allah Almighty, the Lord of the World, and may the Salawat and Salam be upon His beloved Final Messenger Prophet Muhammad (ﷺ).

Global climate changes have increased public awareness of the role of businesses in preserving the environment. Corporations have been blamed for causing environmental and ecological damage from their operations and activities. As such, corporations are expected to exhibit a more responsible way of doing business. Thus, corporate environmental disclosure has emerged to be a significant issue for both the academic literature and businesses.

*Alhamdulillah*, this book entitled "Environmental Disclosure: Teori dan Riset" has been written to shed some light on environmental disclosure issues supported by recent research findings that can corroborate and contribute to the existing knowledge domain. This book is very important as it can be used by academicians as a starting point to do more extensive knowledge exploration and by business practitioners for practical implementation. *Insyallah*, this book can also enrich our understanding of the role of Environmental Management Accounting to decrease the effect of environmental degradation.

*Wassalammualaikum, Wr. Wb.*

Malaysia, November 30<sup>th</sup> 2022

***Prof Dato' Dr. Norman Mohd Saleh***

## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Wr. Wb.*

*Environmental disclosure* saat ini telah menjadi isu krusial di tengah tuntutan berbagai pihak karena degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh perkembangan industri yang begitu pesat. *Environmental disclosure* menyediakan pendekatan menarik untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengeluaran biaya lingkungan dan perolehan profit oleh perusahaan. Aspek ini menjadi penting untuk mendapatkan perhatian untuk memberikan tanggung jawab bisnis yang bukan hanya terfokus pada tingkat keuntungan tetapi juga dampak sosial dan lingkungan,

Oleh karena itu, *Alkhamdulillah* dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT penulis telah menerbitkan buku yang berjudul “ENVIRONMENTAL DISCLOSURE: TEORI DAN RISET”. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk dunia akademisi dan praktis sebagai referensi untuk pengetahuan *environmental disclosure* yang didukung dengan berbagai riset penelitian. Semoga buku ini dapat semakin menumbuhkan kesadaran setiap insan untuk lebih kritis pada perbaikan degradasi lingkungan terutama dari sisi bisnis dan akademis.

Tidak ada gading yang tidak retak, mungkin buku ini masih terdapat berbagai kekurangan dan untuk mengisi celah tersebut, penulis dengan kerendahan hati mengharapkan masukan dari berbagai pihak. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalammualaikum, Wr. Wb.*

Semarang, 30 November 2022

Penulis,

***Dr. Luluk Muhimatul Ifada, S.E.,  
M.Si., Akt., CSRS., CSRA.***



## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Fenomena dan Kesadaran pada Lingkungan Hidup .....	1
1.2 Urgensi <i>Environmental Disclosure</i> Perusahaan .....	3
1.3 Urgensi Kinerja Lingkungan Perusahaan .....	5
1.4 Teori-Teori yang Mendorong Tanggung Jawab terhadap Lingkungan .....	6
1.4.1 Teori Legitimasi.....	6
1.4.2 Teori <i>Stakeholder</i> .....	7
1.4.3 Teori Agensi .....	8
1.4.4 Teori Berbasis Sumber Daya Alam.....	9
1.5 Tantangan Implementasi <i>Environmental Disclosure</i> dan Kinerja Lingkungan .....	9
1.6 Penutup .....	11
BAB II INTEGRASI KINERJA KEUANGAN, <i>ENVIRONMENTAL DISCLOSURE</i> DAN KINERJA LINGKUNGAN PERUSAHAAN.....	13
2.1 Kinerja Keuangan .....	13
2.2 Peran Kinerja Keuangan dalam <i>Environmental Disclosure</i> .....	16

2.3 Peran Kinerja Lingkungan dalam Kinerja Keuangan .....	17
2.4 Pendekatan <i>Research</i> : Kinerja Keuangan dalam <i>Environmental Disclosure</i> .....	19
2.5 Penutup .....	22
<b>BAB III ENVIRONMENTAL COST DISCLOSURE</b> .....	23
3.1 <i>Environmental Cost Disclosure</i> .....	23
3.2 <i>Environmental Cost Disclosure</i> dan <i>Environmental Management Accounting</i> .....	25
3.3 Hubungan <i>Environmental Cost Disclosure</i> dan <i>Environmental Disclosure</i> .....	27
3.4 Pendekatan <i>Research: Environmental Cost</i> .....	28
3.5 Penutup .....	30
<b>BAB IV PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN</b> .....	32
4.1 Tata Kelola Perusahaan .....	32
4.2 Kendala Implementasi Tata Kelola Perusahaan .....	35
4.3 Urgensi Tata Kelola Perusahaan Pada <i>Environmental Disclosure</i> .....	37
4.4 Pendekatan <i>Research</i> : Tata Kelola dan <i>Environmental Disclosure</i> .....	38
4.5 Penutup .....	42
<b>BAB V KETERLIBATAN PEMERINTAH DALAM ENVIRONMENTAL DISCLOSURE</b> .....	43
5.1 Bentuk Keterlibatan Pemerintah .....	43
5.2 Perusahaan dengan Kepemilikan Pemerintah .....	43
5.3 Dampak Kepemilikan Pemerintah dalam <i>Environmental Disclosure</i> .....	45

5.4 Pendekatan <i>Research</i> : Perusahaan dengan Kepemilikan Pemerintah .....	47
5.5 Penutup .....	50
<b>BAB VI IMPLEMENTASI ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING (EMA) .....</b>	<b>52</b>
6.1 Pentingnya <i>Environmental Management Accounting</i> (EMA) .....	52
6.2 Kelompok dan Dimensi <i>Environmental Management Accounting (EMA)</i> .....	55
6.3 Hubungan Strategi Lingkungan, Sistem Pengendalian Lingkungan, dan <i>Environmental Management Accounting</i> (EMA) .....	58
6.4 <i>Environmental Management Accounting (EMA)</i> dan Kinerja Lingkungan .....	60
6.5 Pendekatan <i>Research: Environmental Management Accounting (EMA)</i> .....	61
6.6 Penutup .....	63
<b>BAB VII URGENSI <i>INSTITUTIONAL PRESSURE</i> PADA PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN .....</b>	<b>65</b>
7.1 Teori Kelembagaan .....	65
7.2 Jenis <i>Institutional Pressure</i> .....	67
7.3 Dampak <i>Institutional Pressure</i> Pada Konteks Lingkungan di Perusahaan .....	69
7.4 Pendekatan <i>Research</i> : Tekanan Institusi .....	72
7.5 Penutup .....	76
<b>BAB VIII SHAREHOLDERS VALUE .....</b>	<b>78</b>
8.1 Teori <i>Shareholder Value</i> .....	78

8.2 Urgensi <i>Stakeholders</i> dan <i>Shareholders</i> .....	79
8.3 Peran <i>Environmental Disclosure</i> pada <i>Shareholders Value</i> .....	81
8.4 Pendekatan <i>Research: Shareholders Value</i> .....	82
8.5 Penutup .....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
GLOSARIUM .....	99
INDEX.....	102
TENTANG PENULIS .....	104

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model awal penelitian kinerja keuangan dalam <i>Environmental Disclosure</i> .....	20
Tabel 2. Model akhir penelitian kinerja keuangan dalam <i>Environmental Disclosure</i> .....	20
Tabel 3. Model awal penelitian <i>Environmental Cost</i> .....	28
Tabel 4. Model akhir penelitian <i>Environmental Cost</i> .....	29
Tabel 5. Model awal penelitian tata kelola dan <i>Environmental Disclosure</i> .....	39
Tabel 6. Model akhir penelitian tata kelola dan <i>Environmental Disclosure</i> .....	40
Tabel 7. Model awal penelitian perusahaan dengan kepemilikan pemerintah.....	48
Tabel 8. Model akhir penelitian perusahaan dengan kepemilikan pemerintah.....	48
Tabel 9. Kerangka dan alat detail EMA .....	57
Tabel 10. Model awal penelitian <i>Environmental Management Accounting</i> (EMA) .....	61
Tabel 11. Model akhir penelitian <i>Environmental Management Accounting</i> (EMA) .....	62
Tabel 12. Model awal penelitian tekanan institusi .....	72
Tabel 13. Model akhir penelitian tekanan institusi.....	73
Tabel 14. Model awal penelitian <i>Shareholders Value</i> .....	83
Tabel 15. Model awal penelitian <i>Shareholders Value</i> .....	84

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Model Integrasi Akuntansi Lingkungan .....	56
--	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Fenomena dan Kesadaran pada Lingkungan Hidup**

Isu lingkungan hidup merupakan dampak negatif yang dihasilkan dari segala aktivitas manusia. Di Indonesia sendiri meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah industri menyebabkan berbagai isu lingkungan seperti pencemaran air, menurunnya kualitas tanah, dan semakin tingginya angka penutupan lahan hutan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2020) dari tahun 2013–2019 jumlah sampah dan limbah B3 terus mengalami peningkatan akibat dari peningkatan jumlah penduduk dan jumlah industri. Timbunan sampah plastik meningkat dari 6,7 juta ton pada tahun 2013 menjadi 7,4 juta ton di tahun 2019. Lalu, untuk sampah laut terpantau 5 kawasan pantai yang menghasilkan sampah plastik terbanyak di antaranya Padang, Makassar, Manado, Bitung, dan Ambon. Bahkan penyebaran Covid-19 lalu telah menyisakan isu serius terkait lingkungan berupa peningkatan jumlah limbah medis sebesar 30% dari 296 ton per hari menjadi 382 ton per hari (Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 2022). Apabila dibiarkan, hal ini akan mengancam kelangsungan hidup manusia sehingga kesadaran untuk turut serta dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup perlu dilakukan oleh banyak pihak.

Beberapa dekade lalu praktisi industri, pembuat kebijakan lingkungan, akademisi, dan pengusaha tidak terlalu menaruh perhatian pada masalah lingkungan karena mereka percaya bahwa aktivitas bisnis tidak akan terlalu memberikan dampak pada lingkungan. Namun, hari

ini penurunan atau degradasi lingkungan telah menjadi masalah serius pada tingkat global. Di seluruh dunia, tren bisnis telah berubah dengan begitu cepat. Tren tersebut bukan hanya berorientasi pada peningkatan profit dan keunggulan kompetitif namun juga perlu bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan (Kraus *et al.*, 2020). Tanggung jawab sosial perusahaan saat ini telah menjadi hal utama karena tekanan dari *stakeholder* perusahaan untuk memberikan transparansi kinerja sosial dan lingkungan di luar kinerja ekonominya. *Stakeholder* merupakan orang atau kelompok yang memiliki dan menuntut kepemilikan, hak atau kepentingan dari sebuah perusahaan dan aktivitasnya, di masa lalu, sekarang atau di masa depan. Berdasarkan pendekatan definisi *stakeholder* yang diperluas maka perusahaan tidak boleh membatasi fokusnya hanya pada kepentingan ekonomi dan memaksimalkan kekayaan pemilik. Sebaliknya, perusahaan perlu mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh perusahaan melalui dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi (Ismail *et al.*, 2018). Ini berarti, perusahaan diharapkan dapat menunjukkan cara bisnis yang lebih bertanggung jawab.

Diskusi di atas telah membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa isu lingkungan merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak termasuk perusahaan. Mitigasi terhadap degradasi lingkungan yang efektif melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Transparansi kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan perusahaan menjadi aspek penting yang harus dilakukan untuk membantu masalah lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis



industri sekaligus untuk merespon tuntutan masyarakat yang semakin sadar dan peduli terhadap masalah degradasi lingkungan.

## **1.2 Urgensi *Environmental Disclosure* Perusahaan**

Perusahaan telah mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak seperti pemerintah, investor, pemerhati lingkungan, dan masyarakat untuk memberikan tanggung jawab yang lebih pada lingkungan. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya tingkat kesadaran akan pentingnya isu-isu lingkungan dan keberlanjutan selama beberapa dekade terakhir. Sebab itu, terdapat salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi tekanan tersebut dan mencapai keberlanjutan yaitu melalui pengungkapan lingkungan atau selanjutnya akan kita sebut sebagai *environmental disclosure*.

Beberapa peneliti telah mendeskripsikan *environmental disclosure* sebagai pengungkapan informasi perusahaan terkait dampak lingkungan dan aktivitas operasionalnya (Rahmatika, 2021); sebagai alat untuk memberikan informasi keuangan dan non-keuangan tentang interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan sosialnya dan disajikan dalam laporan keuangan tahunan (Mutmainah & Indrasari, 2017); atau sebagai tindakan mengidentifikasi, mengukur, mengalokasikan, dan/atau mengintegrasikan biaya yang terkait dengan emisi rumah kaca/karbon dan masalah lingkungan lainnya dalam laporan keuangan perusahaan (Jeroh, 2020). Dengan melihat berbagai pendapat tersebut maka *environmental disclosure* dapat disimpulkan sebagai pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan dalam laporan tahunan perusahaan yang menjelaskan mengenai interaksi

antara aktivitas bisnis perusahaan dengan lingkungan fisik dan sosialnya termasuk tanggung jawab pada dampak bisnis yang ditimbulkan.

Pelaporan lingkungan perusahaan bertujuan untuk menyediakan informasi yang sebenar-benarnya dan berguna dari sebuah organisasi/perusahaan yang beroperasi dalam sebuah lingkungan kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut tergabung dalam sebuah laporan tahunan perusahaan yang terintegrasi namun masih bersifat sukarela dan bergantung pada kemauan masing-masing perusahaan. Hal ini memunculkan permasalahan baru karena pada akhirnya pelaporan yang tersedia memiliki informasi yang tidak berkualitas dan cenderung hanya menonjolkan informasi positif tentang perusahaan. *Environmental disclosure* harusnya memuat berbagai informasi penting terkait keputusan apa, bagaimana, kapan, dan sejauh mana pengungkapan masalah lingkungan telah ditangani oleh perusahaan. Bahkan isu yang paling krusial dan sangat darurat adalah tidak tersedianya standar khusus yang menetapkan tata cara pelaporan pengungkapan masalah lingkungan yang benar (Odoemelum & Okafor, 2018), termasuk di Indonesia (Mutmainah & Indrasari, 2017). Padahal laporan tersebut digunakan oleh *stakeholder* untuk menilai kelayakan dan *sustainability* sebuah perusahaan. Intinya adalah seharusnya *stakeholder* diberikan informasi yang sah dan benar bukan berdasar pada laporan yang bersifat sukarela. Sebab itu, aspek lain seperti tata kelola dan aspek lainnya perlu diungkap untuk mengawal implementasi *environmental disclosure* sebuah perusahaan.

### **1.3 Urgensi Kinerja Lingkungan Perusahaan**

Pengelolaan lingkungan telah menjadi bahasan penting dalam perusahaan. Tidak dapat dipungkiri dari seluruh rangkaian aktivitas produksi dan bisnis, perusahaan akan menyisakan limbah yang berkontribusi dalam kerusakan lingkungan. Karenanya, pelaku bisnis seharusnya bukan hanya berorientasi dalam memaksimalkan laba namun juga harus bertanggung jawab pada dampak yang ditimbulkan melalui kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan manifestasi dari hasil komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab pada dampak lingkungan. Beberapa peneliti mendeskripsikan kinerja lingkungan sebagai salah satu bagian dari kinerja perusahaan lainnya untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan (Pelu *et al.*, 2022); termasuk menciptakan lingkungan yang baik (Maulana *et al.*, 2021); dan melestarikan lingkungan dan mengatasi dampak negatif lingkungan sebagai akibat dari aktivitas bisnis perusahaan (Angelina & Nursasi, 2021). Melalui berbagai pendapat tersebut, maka kinerja lingkungan dapat diartikan sebagai salah satu kinerja perusahaan yang dicerminkan melalui tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan dan menanggulangi dampak negatif aktivitas bisnis sehingga lingkungan yang baik dapat diciptakan.

Di Indonesia sendiri kinerja lingkungan selalu diukur melalui salah satu program yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) dengan nama *Public Disclosure Program for Environmental Compliance* atau lebih dikenal dengan istilah PROPER. Program ini adalah program penilaian dan pemeringkatan kemampuan perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup melalui 5 (lima) jenis warna peringkat yaitu peringkat emas, peringkat hijau, peringkat biru,

peringkat merah, dan peringkat hitam. Peringkat emas merupakan peringkat tertinggi sedangkan peringkat hitam menjadi peringkat terendah dalam pengelolaan lingkungan. Perusahaan yang mendapatkan peringkat tertinggi melalui PROPER akan mencerminkan tingkat kepedulian terhadap lingkungan dan pengungkapan lingkungan yang tinggi pula. Semakin sedikit kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis perusahaan maka kinerja lingkungan yang dihasilkan juga semakin baik. Selain berkomitmen pada kelestarian lingkungan, kinerja lingkungan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membangun hubungan yang harmonis dengan *stakeholder* dan calon investor. Pada akhirnya, hal tersebut akan menciptakan nilai perusahaan untuk mencapai keberlanjutan ke depannya.

#### **1.4 Teori-Teori yang Mendorong Tanggung Jawab terhadap Lingkungan**

Menurut Odoemelum & Okafor (2018) terdapat sekelompok teori yang menjelaskan alasan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sejauh mana perusahaan meningkatkan pengungkapan dampak serta kinerja lingkungan. Sekelompok teori tersebut terdiri dari teori legitimasi, teori *stakeholder*, teori agensi, dan teori *natural resource-based view*.

##### **1.4.1 Teori Legitimasi**

Legitimasi mengacu pada sebuah pengakuan dan penerimaan keberadaan perusahaan oleh masyarakat (Ifada *et al.*, 2021). Asumsi utama dari teori legitimasi berhubungan dengan sebuah kontrak

sosial organisasi. Legitimasi merujuk pada persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu perusahaan telah diinginkan, pantas, atau sesuai dengan sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial.

Teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan aktivitas sosial dan pengungkapan lingkungan perusahaan untuk memenuhi kontrak sosial mereka. Selain itu, teori ini mendorong kesadaran bahwa aktivitas bisnis apapun akan menimbulkan dampak pada lingkungan sosial sehingga praktik kinerja dan pengungkapan lingkungan digunakan sebagai alat manajerial untuk menghindari konflik sosial dengan masyarakat. Hal ini karena dengan adanya legitimasi, perusahaan dapat menjamin keberlangsungan bisnis dan membangun hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan.

#### **1.4.2 Teori *Stakeholder***

*Stakeholder* merupakan orang atau kelompok yang memiliki dan menuntut kepemilikan, hak atau kepentingan dari sebuah perusahaan dan aktivitasnya, di masa lalu, sekarang atau di masa depan. Pada dasarnya keberadaan *stakeholder* juga dianggap dapat membuka sumber-sumber ekonomi yang dapat digunakan dalam aktivitas perusahaan. Karenanya dalam teori *stakeholder*, sebuah perusahaan harus melibatkan dan mempertimbangkan kebutuhan *stakeholder* dalam melaksanakan manajemennya. Mutmainah & Indrasari (2017) menjelaskan bahwa teori ini memperhitungkan banyak pihak sebagai *stakeholder* seperti pemerintah, lembaga politik, asosiasi perdagangan, masyarakat, pekerja prospektif,

pelanggan prospektif dan publik secara umum bahkan terkadang pesaing pun dapat terhitung sebagai *stakeholder*.

Teori *stakeholder* berasumsi bahwa sebuah perusahaan harus mampu menyeimbangkan berbagai tuntutan *stakeholders*-nya untuk mendapatkan dukungan secara berkelanjutan yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan pasar. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola pemangku kepentingan dan konflik kepentingan *stakeholder* melalui kinerja dan pengungkapan lingkungan perusahaan. Kinerja dan pengungkapan lingkungan dianggap sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk menanggapi kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda. Hal ini dianggap sebagai strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan *stakeholders* dan membangun hubungan harmonis dalam jangka panjang.

### **1.4.3 Teori Agensi**

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan atau disebut dengan pihak *principal* dengan agen atau manajer yang ditugaskan untuk menjalankan perusahaan. Pada hakikatnya seorang *principal* berhak untuk mendapatkan segala informasi mengenai perusahaannya. Sedangkan pihak agen bertugas untuk menjalankan semua kegiatan perusahaan atas nama *principal* dan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada *principal*.

Pada kasus kerusakan lingkungan, perusahaan bertindak sebagai agen dan *stakeholder* bertindak sebagai *principal* dalam teori ini. Karenanya, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan

informasi berupa laporan tahunan yang “sah” dan benar kepada *stakeholder* melalui pengungkapan dan kinerja lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik dengan pemangku kepentingan yang dapat memberikan dampak negatif pada keberlangsungan perusahaan di masa yang akan datang.

#### **1.4.4 Teori Berbasis Sumber Daya Alam**

Teori berbasis sumber daya alam adalah teori yang berhipotesis bahwa perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan jika menjawab masalah tentang lingkungan alam (S. Hart, 1995). Di masa lalu, kelalaian terkait kerusakan lingkungan dapat dimengerti, sedangkan sekarang jelas bahwa lingkungan alam membantu dalam mencapai keunggulan kompetitif. Teori berbasis sumber daya alam menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi lingkungan seperti pengurangan polusi, penata-gunaan produk, dan pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan kompetitif (Hart & Dowell, 2011). Ini berarti kinerja dan pengungkapan lingkungan sebagai komitmen melestarikan sumber daya lingkungan juga dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan.

### **1.5 Tantangan Implementasi *Environmental Disclosure* dan Kinerja Lingkungan**

Terlepas dari urgensi *environmental disclosure* dan kinerja lingkungan perusahaan terdapat berbagai tantangan untuk melaksanakan kedua aspek tersebut seperti kurangnya komitmen

perusahaan, tidak tersedianya standar pelaporan khusus, masalah biaya, dan kurangnya tenaga terlatih.

Komitmen merujuk pada adanya niat dan keinginan yang kuat dari perusahaan untuk melestarikan lingkungan. Pada dasarnya pelaksanaan kedua aspek tersebut harus didukung dengan niat yang konsisten dan kemauan yang sama dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan. Ini merupakan tugas perusahaan untuk menularkan komitmen dan semangat yang sama dari top manajemen puncak sampai *bottom* manajemen perusahaan. Hal ini karena kurangnya komitmen perusahaan akan menyebabkan *environmental disclosure* dan kinerja lingkungan yang dilakukan menjadi tidak optimal.

Tantangan implementasi *environmental disclosure* dan kinerja lingkungan lainnya adalah terkait standar pelaporan. Masalah standar pelaporan merupakan masalah dalam pelaporan hasil *environmental disclosure* dan kinerja lingkungan perusahaan. Masalah ini adalah hasil dari sifat pelaporan yang masih sukarela sehingga tak jarang perusahaan hanya memberikan informasi positif mengenai kinerja lingkungan mereka. Padahal, laporan tersebut akan digunakan oleh *stakeholder* dan para calon investor dalam memberi nilai pada perusahaan dan menjadi salah satu faktor pengambilan keputusan investasi. Pelaporan yang diterima harusnya bersifat sah dan sebenarnya bukan bersifat “sukarela”. Karenanya, standar pelaporan yang baku perlu segera dibuat oleh pemerintah supaya masalah tersebut dapat segera ditangani.

Selanjutnya adalah masalah biaya. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan untuk dapat melaksanakan *environmental disclosure* dan kinerja lingkungan yang baik adalah persoalan dalam menyisihkan



pendanaan untuk aktivitas tersebut. Program sosial dan kelestarian lingkungan tentu saja memerlukan jumlah dana yang tidak sedikit. Jumlah dana juga perlu dialokasikan dalam proses evaluasi dan perbaikan setelah program dilaksanakan. Hal ini tentu saja menjadi persoalan bagi perusahaan yang masih memiliki skala yang kecil dan pangsa pasar yang terbatas. Karenanya, diperlukan kerja sama dengan pihak lain atau perusahaan lain sehingga pendanaan yang keluar dapat diminimalisir.

Tantangan perusahaan lainnya adalah kurangnya tenaga terlatih. Perusahaan memerlukan tenaga terlatih dan berkualitas di manajemen puncak yang dapat mengatur program sosial dan lingkungan secara efisien dan tepat sasaran. Tenaga yang terlatih juga dapat memberikan alternatif program dengan dana yang sesuai dengan kapasitas perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki tenaga yang terlatih maka program tidak akan dapat dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran. Bahkan yang paling buruk justru akan membawa kerugian bagi perusahaan.

## **1.6 Penutup**

Problematika lingkungan telah menjadi isu serius dan telah mendapatkan banyak perhatian dari banyak pihak. Kerusakan lingkungan merupakan dampak negatif yang dihasilkan dari segala aktivitas manusia termasuk aktivitas operasional bisnis perusahaan. Dalam tren bisnis saat ini, kepedulian akan lingkungan akan menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan menjalin hubungan harmonis di antara pemangku kepentingan dan calon investor. Oleh karenanya perlu

untuk mengungkap aspek penting perusahaan terkait masalah tersebut melalui *environmental disclosure* dan kinerja lingkungan perusahaan.

Buku ini terdiri dari 8 bab yang menawarkan pengetahuan terkait *environmental disclosure* dan kinerja lingkungan perusahaan yang diawali dengan pengenalan terkait konsep dan teori-teori pendorong *environmental disclosure* dan kinerja lingkungan perusahaan. Selain itu, buku ini juga diperkuat dengan hasil-hasil penelitian praktis untuk menentukan aspek penting yang mendukung implementasi *environmental disclosure* dan kinerja lingkungan pada perusahaan.

## **BAB II**

### **INTEGRASI KINERJA KEUANGAN, ENVIRONMENTAL DISCLOSURE DAN KINERJA LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

#### **2.1 Kinerja Keuangan**

Perusahaan tidak akan mampu bertahan di tengah lingkungan global yang kompetitif tanpa bantuan dari para *stakeholder*. Di sisi lain dalam menentukan keputusan keuangan dan investasi, para *stakeholder* tersebut harus mempertimbangkan dan menganalisis kesehatan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Karenanya, kinerja keuangan menjadi subjek yang digunakan untuk menilai seberapa baik sebuah perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Kinerja keuangan juga menjadi ukuran umum keseluruhan posisi keuangan bisnis perusahaan dari periode tertentu.

Kinerja mengacu pada konsep multidimensi yang mencerminkan kemampuan bisnis untuk mengelola sumber daya dengan cara yang berbeda guna menikmati keunggulan kompetitif (Bag & Omrane, 2022); atau diartikan sebagai tingkat prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan (Fauzi & Rukmini, 2018). Kinerja perusahaan telah diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu kinerja non-keuangan dan kinerja keuangan. Kinerja non-keuangan berhubungan dengan kualitas yang dihasilkan seperti tingkat kepuasan pelanggan atau kinerja karyawan, sedangkan kinerja keuangan berkaitan dengan

penilaian kuantitatif terkait omset, pertumbuhan penjualan, dan pendapatan dari periode tertentu.

Kinerja keuangan juga telah didefinisikan oleh beberapa peneliti sebagai alat yang digunakan untuk mengukur perkembangan dan potensi pertumbuhan perusahaan saat ini (Le Thi Kim *et al.*, 2021); gambaran dari setiap hasil ekonomi yang telah dicapai melalui kegiatan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien (Munifatussa'idah, 2019); menjadi tujuan vital yang dilakukan oleh manajer untuk keberlangsungan perusahaan di masa mendatang (Ichsan *et al.*, 2021). Berdasarkan berbagai definisi tersebut maka kinerja keuangan dapat disimpulkan sebagai kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi komponen biaya dan menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien agar dapat mencapai keberlanjutan.

Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan adalah untuk memperoleh informasi yang berguna terkait aliran dana dan penggunaannya. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan oleh manajer untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Menurut Fauzi & Rukmini (2018) pengukuran kinerja keuangan dari sisi perusahaan terdiri dari beberapa metode di antaranya;

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis yang digunakan oleh perusahaan dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perbedaan kuantitatifnya baik dalam jumlah (mutlak) maupun dalam persentase (relatif).

2. Analisis tren (*tendency position*), merupakan teknik analisis keuangan guna mengetahui kecenderungan peningkatan atau penurunan kondisi keuangan.
3. Analisis persentase komponen (ukuran umum), merupakan teknik analisis keuangan guna menentukan persentase investasi pada setiap aset baik terhadap total aset maupun utang.
4. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui jumlah sumber dan penggunaan modal kerja dari dua periode waktu.
5. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui kondisi kas disertai dengan penyebab perubahan kas dalam periode waktu tertentu.
6. Analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis keuangan dalam rangka mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca dan laporan laba rugi baik secara sendiri-sendiri maupun bersamaan.
7. Analisis perubahan laba kotor, merupakan suatu teknik analisis keuangan guna mengetahui posisi laba dan penyebab perubahan laba.
8. Analisis *Break Even*, merupakan suatu teknik analisis keuangan untuk mengetahui tingkat penjualan yang ingin dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Sedangkan dari sisi investor, pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan dua analisis yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal (Fatihudin *et al.*, 2018). Analisis fundamental adalah sebuah analisis yang berdasar pada laporan keuangan perusahaan, prospektus dan profil keuangan perusahaan sedangkan analisis teknikal merujuk pada analisis yang berdasar pada

data statistik pasar yang dicatat oleh lembaga tertentu yang menggambarkan kenaikan dan penurunan permintaan dan penawaran.

Kinerja keuangan yang baik adalah salah satu faktor yang dapat membantu perusahaan mencapai keberlanjutan selain aspek sosial dan manajemen. Evaluasi kinerja keuangan yang baik digunakan untuk tujuan eksternal dan internal. Bagi pihak eksternal yaitu investor, kinerja keuangan yang baik menjadi bahan pertimbangan untuk menanamkan dana atau tetap mempertahankan dana dalam sebuah perusahaan. Lalu bagi perusahaan, kondisi tersebut dapat menaikkan harga saham dan menciptakan nilai perusahaan yang tinggi sehingga perusahaan dapat *sustainable*.

## **2.2 Peran Kinerja Keuangan dalam *Environmental Disclosure***

*Environmental disclosure* merupakan manifestasi dari intensitas industri dalam menanggulangi permasalahan lingkungan walaupun di Indonesia masih belum banyak yang melakukan pengungkapan lingkungan ini (Rahmatika, 2021). Hal ini dipicu oleh keadaan atau kondisi keuangan perusahaan. Menurut teori legitimasi, perusahaan akan selalu mendapatkan tuntutan dari masyarakat agar perusahaan lebih memperhatikan masalah lingkungan. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik akan mampu menghadapi tekanan apapun yang timbul secara sosial. Salah satu indikator kinerja keuangan perusahaan yang dapat dinilai adalah melalui tingkat margin atau profitabilitas yang dimiliki.

Perusahaan dengan tingkat margin keuntungan yang lebih tinggi akan lebih mudah untuk melakukan *environmental disclosure* dan dilegitimasi oleh masyarakat dibandingkan dengan perusahaan dengan

tingkat margin keuntungan yang lebih rendah. Profitabilitas merupakan indikator yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Profitabilitas juga menunjukkan baik tidaknya prospek perusahaan ke depan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan akan semakin terjamin dan dapat diandalkan. Hal tersebut sangat penting bagi perusahaan. Profitabilitas perusahaan yang tinggi memudahkan perusahaan mengatasi tekanan sosial dan kinerja keuangan yang baik tersebut memiliki dampak positif pada *environmental disclosure*. Terdapat beberapa peneliti yang menemukan bahwa kinerja keuangan dengan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *environmental disclosure*. Namun setelah diamati ternyata rata-rata perusahaan yang diteliti memiliki tingkat profitabilitas yang relatif rendah. Perusahaan yang memiliki laba yang rendah merasa tidak memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pengungkapan lingkungan. Hal tersebut terjadi karena perusahaan tersebut menganggap bahwa pengungkapan lingkungan membutuhkan biaya yang tinggi dan justru akan semakin menyulitkan kondisi perusahaan. Pada akhirnya, diskusi tersebut membawa kita bahwa sebuah kesimpulan bahwa *environmental disclosure* hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dengan kinerja keuangan yang mapan. Sebaliknya, perusahaan kecil memerlukan pendekatan lain untuk membantu mereka dalam memberikan tanggung jawab yang sama terhadap lingkungan.

### **2.3 Peran Kinerja Lingkungan dalam Kinerja Keuangan**

Salah satu tujuan utama dari perusahaan yang mencari laba adalah memaksimalkan keuntungan, yaitu memaksimalkan nilai

pemegang saham (Galant & Cvek, 2021). Namun, kondisi bisnis kontemporer perlu mempertimbangkan kepentingan sebagian besar *stakeholder* ketika menjalankan bisnis. Saat ini, *stakeholder* tidak hanya tertarik pada kinerja ekonomi suatu perusahaan tetapi juga tertarik pada kinerja lingkungan dan sosial yang berada di bawah tanggung jawab sosial perusahaan. Kinerja lingkungan tersebut termasuk menjaga lingkungan alam sekitar di mana perusahaan tersebut beroperasi sehingga kelestarian lingkungan dapat memberikan manfaat untuk generasi mendatang.

Apabila sebuah perusahaan ingin memiliki tingkat kinerja lingkungan yang tinggi maka dirasa penting untuk berinvestasi pada kinerja lingkungan tersebut. Investasi kinerja lingkungan yang dilakukan dapat mempengaruhi kinerja keuangannya (Galant & Cvek, 2021). Oleh karena itu, muncullah sebuah pertanyaan tentang apakah investasi lingkungan mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan atau justru mengurangi profitabilitas perusahaan.

Terdapat dua pandangan berbeda yang mendeskripsikan hubungan *environmental disclosure* dengan kinerja keuangan. Pandangan tradisional berpendapat bahwa langkah-langkah antisipasi lingkungan diprediksi akan menyebabkan perusahaan menghadapi kerugian kompetitif sebagai akibat dari meningkatnya biaya produksi perusahaan karena biaya kepatuhan kegiatan produksi lebih besar daripada nilai tambah perusahaan. Kemudian, pandangan revisionis dari Porter menganggap bahwa kinerja lingkungan adalah sumber potensial untuk keunggulan kompetitif karena dapat mengarah pada proses yang lebih efisien, peningkatan produktivitas, biaya kepatuhan yang lebih rendah, peluang pasar baru, dan mempererat hubungan



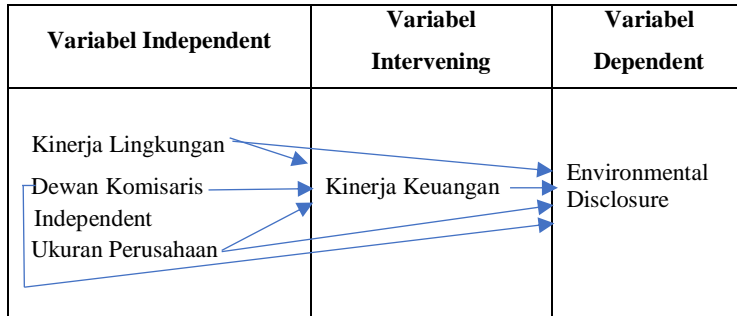
dengan *stakeholder* (Lu & Taylor, 2018). Pandangan kedua membantah pandangan pertama yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh negatif pada kinerja keuangan. Hal ini karena kinerja lingkungan justru akan meminimalisir kewajiban dan konflik sosial di masa depan yang menimbulkan biaya dan menciptakan citra perusahaan yang baik di mata publik sehingga investasi yang diharapkan akan meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan.

#### **2.4 Pendekatan *Research*: Kinerja Keuangan dalam *Environmental Disclosure***

Seperti penjelasan pada bab sebelumnya, pelaksanaan *environmental disclosure* dan kinerja lingkungan perusahaan memerlukan beberapa aspek pendukung yang relevan. Oleh karena itu, sebelum diterapkan secara masif maka penelitian perlu diadakan untuk mengkonfirmasi faktor pendukung tersebut.

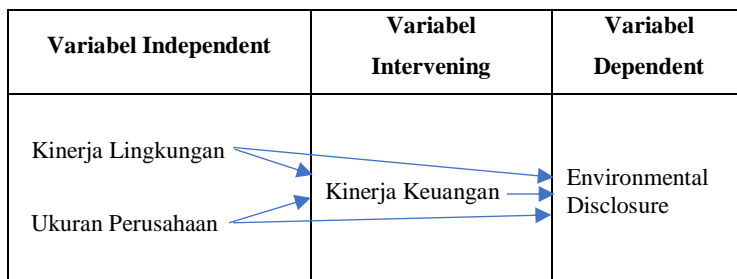
Ifada *et al.* (2021) telah mengadakan penelitian untuk mengetahui peran kinerja lingkungan, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan dan kinerja keuangan terhadap *Environmental Disclosure*. Penelitian tersebut diadakan menggunakan metode kuantitatif dengan sampel berjumlah 117 perusahaan yang diambil dari perusahaan manufaktur dan pertambangan batu bara yang telah mengikuti PROPER dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017 sampai 2019. Berdasarkan kajian literatur, model awal penelitian telah terbentuk seperti pada tabel berikut.

**Tabel 1. Model awal penelitian kinerja keuangan dalam *Environmental Disclosure***



Pada model awal sebelum pengujian terdapat beberapa variabel independen yang terdiri dari kinerja lingkungan, dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel kinerja keuangan menjadi variabel intervening dan *environmental disclosure* menjadi variabel dependen. Masing-masing variabel independen juga secara langsung mempengaruhi *environmental disclosure*. Pada model tersebut terlihat bahwa kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu kinerja lingkungan, dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan sebelum akhirnya dapat mempengaruhi *environmental disclosure*.

**Tabel 2. Model akhir penelitian kinerja keuangan dalam *Environmental Disclosure***



Setelah pengujian, didapatkan komponen aspek yang secara signifikan berpengaruh pada *environmental disclosure*. Kinerja lingkungan memberikan dampak yang baik untuk kinerja keuangan perusahaan dan *environmental disclosure*. Hal ini karena perusahaan yang aktif dan peduli pada kelestarian lingkungan akan memberikan informasi yang berkualitas mengenai pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu, hal tersebut menciptakan citra yang baik untuk meningkatkan kepercayaan di kalangan masyarakat dan calon investor sehingga nilai perusahaan dan harga saham menjadi tinggi.

Selain itu, ukuran perusahaan memberikan dampak kinerja keuangan dan *environmental disclosure*. Perusahaan besar akan memiliki kemampuan untuk mengembalikan modal, asset, dan tingkat keuntungan tinggi sehingga dapat meningkatkan persentase profitabilitas perusahaan. Lebih lanjut, ukuran perusahaan yang besar memungkinkannya memiliki dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan sosial. Alhasil, perusahaan diminta untuk memenuhi kebutuhan banyak *stakeholder*. Karenanya, pada kondisi ini teori *stakeholder* berlaku dan perusahaan akan berusaha untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui *environmental disclosure*. Penelitian tersebut juga telah mengkonfirmasi bahwa keberadaan dewan komisaris independen belum memiliki peran yang efektif dalam menunjang *environmental disclosure* sebuah perusahaan. Hal tersebut dapat disebabkan karena manajer dan direktur memiliki peran dan pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi perusahaan sedangkan keberadaan dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan dapat membuat keputusan negosiasi menjadi lebih lama.

## 2.5 Penutup

Kinerja keuangan merupakan kinerja perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk menghasilkan keuntungan. Pengukuran kinerja keuangan digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Bagi pihak internal perusahaan, kinerja keuangan yang baik akan menarik minat calon investor untuk menanamkan dana sehingga dapat menciptakan nilai perusahaan. Sedangkan bagi pihak eksternal perusahaan, kondisi tersebut akan memberikan keuntungan investasi dana yang ditanamkan. Karenanya, kinerja keuangan merupakan aspek yang sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai keberlanjutan.

Bab ini telah mengkonfirmasi integrasi hubungan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan *environmental disclosure*. Kinerja lingkungan yang baik mendorong terciptanya citra perusahaan yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi dapat meningkatkan investasi dan profitabilitas perusahaan. Alhasil kinerja keuangan yang tercapai memberikan kontribusi yang positif bagi *environmental disclosure* perusahaan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dua aspek pendukung *environmental disclosure* telah ditemukan yaitu kinerja keuangan dan ukuran perusahaan.

## **BAB III**

### **ENVIRONMENTAL COST DISCLOSURE**

#### **3.1 *Environmental Cost Disclosure***

Perusahaan akan mengungkapkan informasi tentang kepedulian mereka pada lingkungan dengan cara menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan memiliki alokasi khusus untuk mendanai biaya lingkungan. Biaya lingkungan atau *environmental cost* merujuk pada kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan upaya lingkungan ke dalam strategi bisnis (Rini & Adhariani, 2021); atau diartikan sebagai biaya-biaya yang terkait dengan kerusakan aktual dan potensial dari alam akibat kegiatan ekonomi (Oshiole *et al.*, 2020); atau secara spesifik didefinisikan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencegah dan mengurangi dampak kerusakan ekologi yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan (Adyaksana *et al.*, 2022). Biaya-biaya yang dimaksud dapat berupa biaya untuk pencegahan, perencanaan, pembuangan, dan perbaikan kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas internal dan eksternal perusahaan. Menurut Shil & Iqbal (2005) biaya lingkungan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berikut:

1. Biaya lingkungan untuk pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam suatu wilayah usaha oleh kegiatan produksi dan jasa;
2. Biaya lingkungan untuk pengendalian dampak lingkungan yang timbul di hulu atau hilir sebagai akibat dari kegiatan produksi dan jasa;
3. Biaya lingkungan dalam kegiatan pengelolaan;

4. Biaya lingkungan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan;
5. Biaya lingkungan dalam kegiatan sosial;
6. Biaya lingkungan yang sesuai dengan kerusakan lingkungan.

Biasanya biaya-biaya tersebut akan dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan sebagai bentuk dari tanggung jawab “pengungkapan”.

Secara umum, pengungkapan biaya lingkungan atau yang selanjutnya akan kita sebut sebagai *Environmental Cost Disclosure* (ECD) merupakan analisis informasi keuangan dan non-keuangan untuk mendukung proses pengelolaan lingkungan internal (Falope *et al.*, 2019). ECD merujuk pada pengungkapan biaya-biaya yang digunakan untuk menanggulangi dampak buruk pada lingkungan akibat aktivitas bisnis perusahaan kepada para pemegang kepentingan. ECD memiliki tujuan untuk mengelola dan meningkatkan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan secara bersamaan.

Area utama implementasi ECD terdapat pada penilaian biaya/pengeluaran lingkungan tahunan, penetapan harga produk, penganggaran, penilaian investasi, penghitungan biaya, dan penghematan proyek lingkungan, atau penetapan target kinerja terukur (Falope *et al.*, 2019). ECD menyediakan tindakan yang memberikan evaluasi risiko dan memperkuat hubungan dengan *stakeholder* dan *shareholder* sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan mencapai kinerja keuangan (Al-Naser *et al.*, 2021). Pengungkapan isu-isu sosial dan lingkungan berpotensi memiliki dampak pada pencapaian kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan perusahaan.

### ***3.2 Environmental Cost Disclosure dan Environmental Management Accounting***

Masalah utama yang sering muncul dari kebijakan ekonomi di masa lalu dan masa kini adalah terkait ketidakmampuan perusahaan dalam memiliki standar khusus mengenai definisi, perhitungan, atau menetapkan biaya kerusakan eksternal dari kegiatan ekonomi perusahaan. Selain itu, faktanya manajer bagian lingkungan jarang memiliki akses ke dokumen akuntansi biaya aktual perusahaan dan hanya mengetahui sebagian kecil dari biaya lingkungan agregat. Sedangkan di sisi lain, manajer akuntansi memiliki sebagian besar informasi tetapi tidak dapat memisahkan bagian lingkungan tanpa standar atau panduan (Jasch, 2003). Akibatnya, terdapat beberapa biaya aktual lingkungan yang “tersembunyi dan terlewat” dari pencatatan. Kemudian juga memicu isu baru terkait akuntansi lingkungan perusahaan. Seorang akuntan profesional harus mampu membuat keputusan tentang pencatatan biaya lingkungan secara terpisah, agar situasinya jelas dan dapat memberikan informasi kepada manajer yang memungkinkannya membuat keputusan terbaik yang akan diinformasikan kepada perusahaan yang dipimpinnya (Rakos & Antohe, 2014). Isu tersebut mendorong kebutuhan para manajer tentang bagaimana memperoleh informasi lingkungan dan menyebabkan pengembangan instrumen keputusan baru bernama akuntansi manajemen lingkungan atau yang lebih dikenal sebagai *Environmental Management Accounting* (EMA).

EMA telah dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan akuntansi manajemen tradisional sehubungan dengan aktivitas manajemen dan mengenai keputusan yang melibatkan masalah

lingkungan seperti biaya dan dampak lingkungan. Akuntansi dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi **eksternal** pemegang saham dan otoritas keuangan yang memiliki kepentingan ekonomi yang kuat sehingga pelaporan keuangan diatur dalam Undang-Undang dan memiliki standar pelaporan internasional. EMA merupakan pendekatan gabungan yang menyediakan transisi data dari akuntansi keuangan, akuntansi biaya dan neraca massa untuk meningkatkan efisiensi material, mengurangi dampak lingkungan dan risiko dan mengurangi biaya perlindungan lingkungan (Jasch, 2003); dapat diartikan juga sebagai identifikasi, pengumpulan, estimasi, analisis, pelaporan internal, dan penggunaan bahan dan informasi aliran energi, informasi biaya lingkungan, dan informasi biaya lainnya untuk pengambilan keputusan konvensional dan lingkungan dalam suatu organisasi (Xiaomei, 2004).

Fokus inti dari EMA adalah pada penilaian total pengeluaran lingkungan tahunan untuk pengolahan emisi, pembuangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sedangkan biaya memiliki kaitan yang erat dengan sistem manajemen akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan. Ini berarti ECD menjadi bagian dari EMA. ECD mengukur sejauh mana penerapan EMA dinilai secara efektif dapat menangani permasalahan lingkungan. Ketika perusahaan menerapkan EMA maka perusahaan dianjurkan untuk memberikan informasi alokasi anggaran untuk biaya lingkungan. Untuk organisasi bisnis, EMA adalah alat yang efektif yang apabila diterapkan dengan benar akan memungkinkan pengurangan biaya dan memaksimalkan keuntungan, sementara pada saat yang sama meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka (Xiaomei, 2004). Dengan demikian



EMA menjadi wujud nyata dari perhatian dan komitmen perusahaan dalam strategi pengendalian dampak lingkungan, serta pengumpulan informasi terkait biaya dari kegiatan internal yang membantu perusahaan mencapai kinerja lingkungan yang berkelanjutan.

### **3.3 Hubungan *Environmental Cost Disclosure* dan *Environmental Disclosure***

Informasi biaya lingkungan merupakan informasi yang lebih konkrit yang dapat dengan mudah ditemukan ketika “pengungkapan”, serta dapat dibandingkan, diaudit, dan divalidasi dengan angka-angka lainnya dalam laporan keuangan. Karenanya, informasi kuantitatif ini tidak mudah dimanipulasi dibanding informasi naratif dari perusahaan. Informasi kuantitatif ini menghindarkan publik dari etika tidak baik perusahaan berbentuk

*greenwashing* di mana perusahaan berusaha menciptakan citra peduli lingkungan yang palsu sebagai strategi pemasarannya. Dengan demikian, ECD sangat penting untuk dilakukan supaya ada aksi nyata kepedulian lingkungan yang tervalidasi dan bukan citra baik semata.

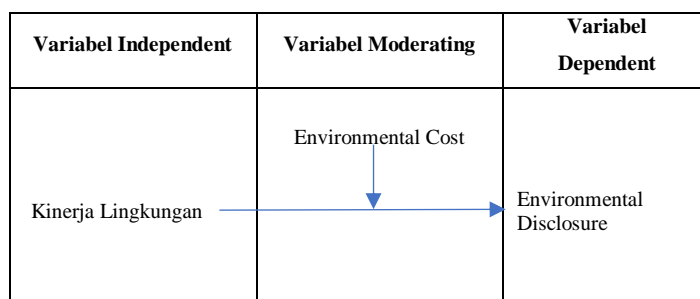
Ketika melakukan pengelolaan lingkungan, perusahaan akan mengalokasikan dana untuk biaya degradasi lingkungan. Namun, perusahaan perlu menyadari bahwa biaya ini adalah investasi jangka panjang yang akan dikeluarkan secara terus menerus. Biaya lingkungan seharusnya bukan hanya sekadar dianggap sebagai ekstra pengeluaran dana perusahaan saja, tetapi juga sebagai biaya yang akan berpotensi mengurangi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana perusahaan dapat

menurunkan total biaya lingkungan yang efisien sehingga tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Kehadiran akuntansi manajemen lingkungan memiliki andil yang sangat besar dalam mendorong perusahaan untuk mendeteksi dan mengelola kerusakan lingkungan dengan biaya lingkungan yang efisien. Perusahaan yang mampu mengelola biaya lingkungan dan mempertahankan kemampuannya dalam menghasilkan laba bukan hanya akan menciptakan citra yang baik di antara *stakeholder* dan masyarakat namun juga membangun kepercayaan untuk penanaman investasi di antara calon investor.

### 3.4 Pendekatan *Research: Environmental Cost*

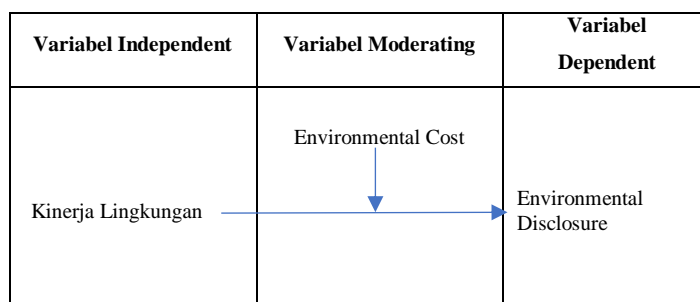
Pendekatan penelitian telah dilakukan dan dipublikasikan dalam Ifada & Saleh (2022) mengenai *Environmental Cost*. Data sebanyak 492 diambil dari perusahaan publik di kawasan Asia yang sedang berkembang selama 12 tahun yakni dari 2007–2019. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara *Environmental Cost*, kinerja lingkungan, dan *Environmental Disclosure*. Berdasarkan pada kajian literatur, model awal penelitian telah terbentuk seperti pada tabel berikut.

**Tabel 3. Model awal penelitian *Environmental Cost***



Pada model awal sebelum pengujian terdapat variabel independen kinerja lingkungan, variabel moderating *environmental cost*, dan variabel dependen *environmental disclosure*. Kinerja lingkungan diharapkan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Sedangkan *environmental cost* diduga memperlemah pengaruh kinerja lingkungan pada *environmental disclosure*. Pada kasus ini, *environmental cost* mewakili penerapan EMA pada perusahaan.

**Tabel 4. Model akhir penelitian *Environmental Cost***



Setelah pengujian didapatkan model yang sama dengan model awal penelitian. Artinya tidak ada hipotesis yang ditolak. Kinerja lingkungan memiliki hubungan yang positif terhadap *environmental disclosure*. Pengungkapan lingkungan kepada publik akan semakin baik apabila perusahaan juga memiliki kinerja lingkungan yang baik. Lalu, *environmental cost* ditemukan melemahkan hubungan antara kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure*. *Environmental cost* merupakan pendekatan kuantitatif yang lebih tervalidasi. Hal ini dapat meringkas dan mengurangi pengungkapan naratif yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan EMA yang tercantum melalui *environmental cost* telah terbukti dapat mengurangi kebutuhan perusahaan terhadap

pengungkapan naratif dan memastikan manajer menggunakan sumber daya secara efektif untuk kepentingan lingkungan sehingga pengeluaran biaya lingkungan dapat diminimalisir. Kehadiran *environmental cost* yang tinggi tidak menjamin kinerja lingkungan dan *environmental disclosure* perusahaan menjadi semakin baik. Justru hal tersebut memungkinkan alokasi dan pengelolaan yang tidak efisien. Selain itu, *environmental cost* yang tinggi memiliki potensi untuk mengurangi profit perusahaan sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan calon investor pada perusahaan.

### **3.5 Penutup**

*Environmental cost* adalah bagian dari *Environmental Management Accounting* (EMA) yang meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menunjang komitmen dan kepedulian perusahaan atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas bisnis mereka. EMA mempromosikan pendekatan keseluruhan untuk melengkapi celah yang ditimbulkan dari pencatatan akuntansi tradisional. EMA melakukan pendekatan yang menyediakan transisi data dari akuntansi keuangan, akuntansi biaya dan neraca massa untuk meningkatkan efisiensi material, mengurangi dampak lingkungan dan risiko dan mengurangi biaya perlindungan lingkungan. Sedangkan *environmental cost* menawarkan pendekatan kuantitatif yang dapat membantu perusahaan meringkas dan mengurangi pengungkapan yang bersifat naratif.

*Environmental cost* perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar tidak menghambat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Biaya lingkungan menjadi investasi jangka panjang yang akan menguntungkan perusahaan dalam menciptakan citra yang baik di

masyarakat. Namun, pengelolaannya perlu dilakukan dengan bijak agar tidak merugikan perusahaan. Diskusi sebelumnya telah membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa perusahaan yang mampu menyeimbangkan dua kepentingan yaitu mengelola biaya lingkungan dan mempertahankan kemampuannya dalam menghasilkan laba bukan hanya akan menciptakan citra yang baik di antara *stakeholder* dan masyarakat tetapi juga akan membangun kepercayaan untuk penanaman investasi di antara calon investor. Bab ini telah mengkonfirmasi hubungan antara *Environmental Cost*, kinerja lingkungan, dan *Environmental Disclosure*. Hasil dari penelitian tersebut telah menemukan faktor baru yang perlu mendapatkan perhatian ketika mengimplementasikan *environmental disclosure* di perusahaan yaitu implikasi EMA yang diwakili oleh *environmental cost*.

## **BAB IV**

### **PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**

#### **4.1 Tata Kelola Perusahaan**

Keberhasilan ekonomi suatu perusahaan tidak hanya bergantung pada efisiensi, inovasi dan kualitas manajemennya tetapi juga pada kepatuhan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Dalam beberapa dekade terakhir, tata kelola dianggap sebagai aspek penting penunjang keberlanjutan perusahaan. Menurut beberapa peneliti tata kelola dapat diartikan sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial perusahaan sehingga menyeimbangkan kepentingan *stakeholders* dengan masyarakat luas (Gerged, 2021); dan merujuk pada serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, *stakeholders*, dan *shareholders*-nya (Goel, 2018). Melalui pendapat tersebut maka tata kelola dapat disimpulkan sebagai seperangkat sistem, proses, aturan, dan kebijakan yang mengatur pengelolaan dan hubungan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Tata kelola yang baik memiliki lima prinsip umum yang melekat padanya berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi**, didefinisikan sebagai prinsip yang mengharuskan sebuah perusahaan untuk memberikan keterbukaan terhadap informasi yang jelas, relevan dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan seperti laporan keuangan, laporan tahunan perusahaan, dan data-data lain.

2. Akuntabilitas, secara umum merujuk pada proses pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan. Perusahaan harus dikelola dengan terukur dan sejalan dengan kepentingan perusahaan dengan selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini manajemen perlu memberikan laporan tentang semua kegiatan dan keputusan perusahaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal termasuk pengungkapan alasan jika terdapat tujuan yang tidak tercapai.
3. Tanggung jawab, prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan tanggung jawab kepada sosial dan lingkungan.
4. Independensi, prinsip ini menghindari pola keterlibatan pihak yang berpotensi mengintervensi dan menekan perusahaan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga perusahaan perlu mengelola operasionalnya secara profesional seperti pengambilan keputusan yang objektif namun bebas dari intervensi pihak ketiga.
5. Kewajaran dan kesetaraan, prinsip ini menghindari sikap ketidakadilan. Artinya, perusahaan dituntut untuk memberikan pemerataan dan kesempatan yang sama bagi seluruh pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencapaian tujuan perusahaan untuk mendapatkan hak yang adil.

Lebih lanjut, dalam beberapa literatur dan penelitian di banyak negara, beberapa peneliti menggunakan berbagai aspek untuk mengukur tata kelola sebuah perusahaan seperti Goel (2018) yang mengukur tata kelola 68 perusahaan dari 6 sektor di India dengan:

- a. *Shareholders* terdiri dari jumlah rapat direksi per tahun; jumlah direktur independen di dewan; jumlah komite direksi; jumlah komite yang diketuai oleh dewan independen; dan rapat terpisah direksi independen.
- b. Karyawan terdiri dari kode etik untuk top manajemen yang tersedia di website; jumlah direktur wanita di dewan; kebijakan *whistle blower* dinyatakan dan ditetapkan; dan persentase keluhan karyawan yang ditangani setiap tahun.
- c. *Suppliers* dan *customers* terdiri dari persentase keluhan yang ditangani per tahun; dan penerbitan laporan pertanggungjawaban bisnis dan keberlanjutan.
- d. Masyarakat terdiri dari pengeluaran tahunan untuk CSR dan persentase terhadap laba bersih; jumlah inisiatif sosial yang dilakukan oleh perusahaan.
- e. Lingkungan terdiri dari jumlah inisiatif lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan; jumlah sertifikat ISO yang diperoleh perusahaan; serta penghargaan dan pengakuan yang diraih oleh perusahaan.

Kemudian Gerged (2021) yang mengukur tata kelola pada 500 perusahaan di Yordania menggunakan ukuran dewan direksi; dewan independen; *CEO duality* atau jabatan ganda seseorang di dewan direksi dan dewan komisaris; kepemilikan manajerial; kepemilikan institusional; kepemilikan asing atau persentase kepemilikan investor asing; *ownership concertation* atau kepemilikan saham seseorang yang



lebih dari 5%. Hampir sama seperti Giannarakis *et al.* (2020) yang menggunakan direktur independen; kehadiran direktur independen utama; frekuensi rapat komite audit; kehadiran komite berkelanjutan; dan usia direktur termuda untuk mengukur tata kelola dari 278 perusahaan di Amerika Serikat. Ofoegbu *et al.* (2018) yang mengukur tata kelola pada 303 perusahaan di Nigeria menggunakan dewan independen; ukuran dewan; rapat dewan; independensi komite audit; dan komite lingkungan sebagai karakteristik dewan perusahaan. Sementara itu, tata kelola untuk organisasi atau lembaga yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah khususnya industri keuangan syariah terdapat keterlibatan dewan khusus bernama Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan dewan yang bertugas mengawasi dan memberikan saran kepada pengelola tentang implementasi prinsip-prinsip dalam aktivitas operasional lembaga sekaligus menjadi wakil dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) pada industri keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan diskusi di atas terdapat berbagai pengukuran yang dapat dipakai untuk menilai keefektifan penerapan tata kelola dalam sebuah perusahaan. Pengukuran yang digunakan tersebut harus sesuai dengan karakteristik industri dan penerapan praktis di perusahaan atau lembaga supaya penilaian tata kelola dapat dilakukan secara tepat.

#### **4.2 Kendala Implementasi Tata Kelola Perusahaan**

Tata kelola perusahaan pada akhirnya menjadi isu utama di bidang organisasi bagi berbagai pihak seperti akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan baik publik maupun manajerial. Walaupun demikian, implementasi tata kelola pada perusahaan memiliki kendala

dan tantangan yang harus dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi berupa:

Perusahaan dikendalikan oleh anggota keluarga atau pemegang saham mayoritas (Masud *et al.*, 2018). Ketika manajemen dan keluarga memiliki hubungan kombinasi maka hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan orientasi keputusan dan tujuan antara keluarga sebagai *shareholders* dan para pemegang saham lainnya. Terkadang perusahaan dengan kepemilikan keluarga menginginkan investasi jangka panjang yang menghindari risiko sedangkan pemegang saham lain lebih cenderung *risk taker* untuk mengharapkan *return* tinggi. Selain itu, kepemilikan keluarga dapat mengakibatkan *entrenchment effect* di mana seorang pemegang saham menggunakan hak kontrolnya untuk tujuan pribadi. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan tidak terikat lagi pada tata kelola dan mekanisme kontrol yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, masalah-masalah di atas akan menurunkan nilai perusahaan dan kepercayaan masyarakat pada perusahaan.

Kendala selanjutnya adalah tidak adanya peraturan efektif dan transparansi. Masalah utama dalam implementasi tata kelola perusahaan adalah tentang komitmen untuk memberikan ketegasan peraturan dan transparansi. Setiap perusahaan diharapkan memiliki komitmen implementasi tata kelola yang tinggi yang diaplikasikan melalui penetapan pedoman tata kelola perusahaan dengan sanksi pelanggaran yang jelas. Selain itu, pedoman yang dibuat harus meliputi lima prinsip utama tata kelola sehingga penerapannya dapat menciptakan etika yang sehat baik dalam perusahaan maupun di antara para karyawan.

Kemudian, kendala yang dihadapi dalam penerapan tata kelola perusahaan adalah adanya tekanan dari pihak eksternal seperti aktivis, lembaga swadaya, dan masyarakat internasional tentang perusahaan yang harus peduli pada sosial dan lingkungan. Tuntutan tersebut tentu saja mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam kegiatan tanggung jawab terhadap lingkungan. Hal tersebut melibatkan penerapan tata kelola dan manajemen kontrol agar tanggung jawab lingkungan dapat dilakukan dengan baik.

Tantangan lain dari penerapan tata kelola adalah mengenai struktur direksi atau komisaris dengan keragaman gender. Gaya kepemimpinan perempuan dan laki-laki selalu menjadi isu menarik. Keragaman gender pada struktur dewan meningkatkan efisiensi kepemimpinan dan efektivitas dengan membawa beragam ide, pandangan, keterampilan, dan pengalaman ke dalam ruang rapat, sebagai serta meningkatkan independensi dewan. Namun demikian, bagi sebagian perusahaan memutuskan, melibatkan, dan membuat komposisi keragaman gender dalam dewan masih menjadi sebuah kesulitan.

#### **4.3 Urgensi Tata Kelola Perusahaan Pada *Environmental Disclosure***

Saat ini, penyimpangan keuangan dan non-keuangan perusahaan dan kinerja lingkungan yang gagal telah menyebabkan pengenalan aturan dan standar baru untuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan, seperti komite dan pelaporan lingkungan ke dalam dewan perusahaan. Karenanya, struktur tata kelola perusahaan berperan aktif untuk mengubah kepemilikan, dan struktur dewan telah memfokuskan

kembali untuk menambahkan masalah sosial dan ekologi ke dalam rencana manajemen perusahaan (Masud *et al.*, 2018). Dalam menghadapi dunia bisnis yang saat ini rentan terhadap isu-isu iklim, struktur dan aplikasi tata kelola perusahaan yang kuat dan kreatif sangat penting untuk mengatasi tantangan lingkungan tersebut.

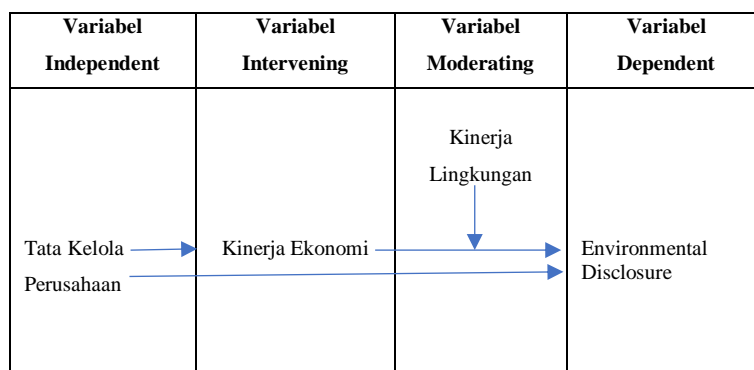
Perusahaan yang mematuhi prosedur dan kebijakan tata kelola dapat mengurangi masalah agensi dan asimetri informasi serta dapat menunjukkan sikap akuntabilitas tinggi kepada para pemangku kepentingan. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan pengungkapan lingkungan perusahaan. Kilincarslan *et al.* (2020) menyatakan bahwa dalam perspektif legitimasi menunjukkan bahwa mematuhi praktik tata kelola yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi perusahaan tetapi juga menekan perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan lingkungan mereka dalam rangka menciptakan reputasi dan citra mereka di pasar global. Ini berarti kehadiran tata kelola menjadi aspek penting secara internal yang dapat mendukung perusahaan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan kepada masyarakat secara layak.

#### **4.4 Pendekatan *Research*: Tata Kelola dan *Environmental Disclosure***

Penelitian telah dilakukan mengenai tata kelola perusahaan dalam skala besar dengan data sekunder di Asia Pasifik dari tahun 2006 hingga 2020. Total sampel sebanyak 2084 perusahaan publik berasal dari 15 negara yakni Australia, Amerika Serikat, Cina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, Filipina, Srilanka, Pakistan, Kazakstan, Bangladesh, Hongkong, dan India. Penelitian digunakan

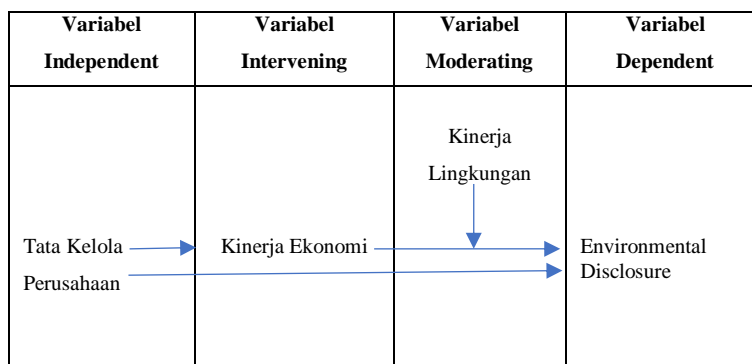
untuk menguji hubungan tata kelola perusahaan, kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan pengungkapan lingkungan. Berdasar pada kajian literatur, model awal penelitian yang terbentuk dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. Model awal penelitian tata kelola dan *Environmental Disclosure***



Pada model awal penelitian telah ditentukan beberapa variabel yang terlibat di antaranya tata kelola perusahaan sebagai variabel independen, kinerja ekonomi sebagai variabel intervening, kinerja lingkungan sebagai variabel moderating, dan *environmental disclosure* sebagai variabel dependen. Tata kelola diharapkan memiliki pengaruh yang positif terhadap *environmental disclosure* dan kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi diharapkan dapat memperkuat kemampuan *environmental disclosure* perusahaan. Sedangkan kinerja lingkungan berperan sebagai aspek yang memperkuat/memperlemah pengaruh antara kinerja ekonomi dan *environmental disclosure* perusahaan.

**Tabel 6. Model akhir penelitian tata kelola dan *Environmental Disclosure***



Setelah pengujian, didapatkan model akhir penelitian seperti tabel di atas dengan diskusi menarik mengenai hubungan integrasi di antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan *environmental disclosure*. Sedangkan pada hubungan tata kelola perusahaan telah dibuktikan memiliki pengaruh yang positif pada kinerja ekonomi dan *environmental disclosure*. Tata kelola perusahaan secara positif mempengaruhi pengembalian ekuitas dan efisiensi. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan elemen penting dalam memulihkan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan membantu perusahaan untuk memulihkan efisiensi dalam pengembalian modal sehingga pengambil kebijakan perlu mengapresiasi peran tata kelola dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kualitas keputusan yang dibuat oleh dewan direksi mempengaruhi produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Lebih lanjut, komposisi dewan merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab untuk menetapkan agenda sosial dan lingkungan perusahaan, mengalokasikan sumber daya perusahaan, serta mengembangkan strategi untuk bisnis

yang berkelanjutan termasuk menciptakan citra perusahaan dengan meningkatkan kesadaran publik. Akhirnya, sifat independensi pada tata kelola perusahaan yang tinggi akan memperkuat pengungkapan lingkungan yang berada pada posisi hukum yang lemah.

Kemudian, diskusi menarik telah ditemukan untuk menguraikan integrasi hubungan antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan *environmental disclosure*. Pertama, hubungan kinerja ekonomi dan *environmental disclosure*. Kinerja ekonomi yang dicerminkan melalui faktor ROA memiliki pengaruh negatif pada pengungkapan lingkungan. Profitabilitas merupakan aspek penting untuk membangun kepercayaan calon investor dalam investasi. Tantangan perusahaan di tengah isu lingkungan yang ketat saat ini adalah tentang bagaimana tetap mempertahankan kinerja ekonominya di tengah pengeluaran berkelanjutan untuk lingkungan. Perusahaan yang mengharapkan keseimbangan antara perolehan profitabilitas perusahaan dan pengungkapan lingkungan akan menyebabkan efisiensi. Efisiensi pada pengelolaan lingkungan akan menyebabkan berkurangnya biaya lingkungan. Kedua, dampak kinerja lingkungan pada hubungan kinerja ekonomi dan *environmental disclosure*. Kinerja lingkungan memperlemah kinerja ekonomi yang diwakilkan melalui faktor ROE pada *environmental disclosure*. Kinerja lingkungan dengan biaya berlebihan dan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh akan memperlemah permodalan perusahaan dan berujung pada lemahnya tingkat pengungkapan perusahaan. Masalah ini merujuk pada pengaturan dan pengelolaan yang efisien. Berdasarkan diskusi di atas, aspek pada kinerja ekonomi memiliki dampak yang beragam. Pada hubungan langsung dengan *environmental disclosure*, ROA yang

berpengaruh. Namun, ketika melibatkan kinerja lingkungan, faktor ROE yang berpengaruh.

#### **4.5 Penutup**

Tata kelola perusahaan merujuk pada seperangkat sistem, proses, aturan, dan kebijakan yang mengatur pengelolaan dan hubungan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencapaian tujuan perusahaan. Tata kelola yang baik harus mengikuti lima prinsip utama transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Walaupun demikian dalam implementasinya di masa mendatang, tata kelola masih memiliki berbagai kendala yang dihadapi. Sebuah perusahaan yang dapat mentaati dan melaksanakan praktik tata kelola dengan baik berpotensi mengurangi konflik akibat asimetri informasi, masalah agensi, dan membantu perusahaan meningkatkan akuntabilitas di hadapan publik sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Selain itu, kehadiran tata kelola sangat memungkinkan perusahaan meningkatkan kemampuan dalam pengungkapan lingkungan.

Bab ini juga telah mengkonfirmasi hubungan tata kelola, kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan melalui penelitian. Hasil dari penelitian telah menemukan beberapa faktor baru yang memiliki kontribusi dalam pengungkapan lingkungan yaitu tata kelola perusahaan dan kinerja ekonomi. Kedua faktor tersebut menjadi pertimbangan yang harus ditingkatkan oleh manajemen untuk mendorong kinerja perusahaan yang *sustainable*.



## **BAB V**

### **KETERLIBATAN PEMERINTAH DALAM *ENVIRONMENTAL DISCLOSURE***

#### **5.1 Bentuk Keterlibatan Pemerintah**

Lingkungan menjadi aspek penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Karenanya, perusahaan-perusahaan sebagai bagian dari lingkungan wajib mengelola dan menjaga lingkungan dari kebijakan global hingga hal-hal yang lebih mendetail mengenai pengelolaan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat telah menekan perusahaan untuk melibatkan aspek non-keuangan berupa sosial dan lingkungan ke dalam aktivitas bisnis mereka. Namun disebabkan sifat sukarela dalam pelaporan kinerja dan pengungkapan lingkungan maka kehadiran pemerintah dilibatkan sebagai pengontrol eksternal bagi perusahaan. Aspek kontrol dilakukan dengan berbagai cara seperti peraturan perizinan usaha, program unggulan seperti PROPER, peraturan perundang-undangan, dan evaluasi yang harus dilewati oleh perusahaan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ini berarti aspek kontrol yang dilakukan oleh pemerintah telah mengindikasikan keseriusan dan komitmen tinggi pemerintah Indonesia untuk mengatur perusahaan dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

#### **5.2 Perusahaan dengan Kepemilikan Pemerintah**

Selain menjadi aspek pengontrol eksternal, pemerintah juga dapat menjadi salah satu pemilik dalam sebuah perusahaan. Istilah ini dikenal di Indonesia sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di mana

kepemilikan perusahaan dengan label tersebut berada pada naungan negara dan sekaligus menjadi usaha untuk mendapatkan pendapatan negara dan melayani kepentingan masyarakat. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah diartikan sebagai perusahaan yang sebagian besar atau bahkan keseluruhan modalnya berasal dari kekayaan pemerintah yang dipisahkan. Perusahaan ini didirikan untuk melayani masyarakat di berbagai aspek seperti keuangan perbankan, transportasi, telekomunikasi, power, dan energi.

Kehadiran perusahaan ini menjadi aspek penting dalam mendukung kebijakan ekonomi, produksi sumber daya alam untuk masyarakat, dan pelopor usaha untuk sektor yang belum diminati oleh swasta. Terdapat tiga jenis perusahaan dengan kepemilikan pemerintah di Indonesia yaitu perusahaan Perseroan, perusahaan Perseroan Terbatas, dan Perusahaan Umum.

1. Perusahaan Perseroan merupakan perusahaan yang modalnya berbentuk saham dengan kepemilikan mayoritas atau paling sedikit 51% saham dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan ini dikenal dengan istilah Persero seperti PT PLN, PT Pos Indonesia, PT Pertamina, PT Telkom, Garuda Indonesia, dan lain sebagainya.
2. Perusahaan Terbatas merupakan perusahaan yang saham dan modal yang dimiliki memenuhi kriteria tertentu atau perusahaan yang melakukan penawaran umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan ini dikenal dengan istilah Persero Tbk seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Astra Internasional Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan lain sebagainya.
3. Perusahaan Umum merupakan perusahaan yang bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat dengan kepemilikan keseluruhan

modalnya tidak berbentuk saham dan berasal dari pemerintah. Perusahaan ini lebih dikenal dengan istilah Perum seperti Perum Perumahan Umum Nasional, Perum Pegadaian, Perum Peruri, dan lain sebagainya.

Selain perusahaan-perusahaan milik pemerintah terdapat pula Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS di mana kepemilikan modalnya berasal dari swasta untuk mendapatkan keuntungan serta Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD di mana kepemilikan modalnya sebagian besar berasal dari daerah.

Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah biasanya diukur dengan cara membuat rasio antara persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah dengan persentase total saham yang beredar (Ifada & Indriastuti, 2021); (Farhan & Freihat, 2021); (Amosh & Mansor, 2020). Perusahaan ini memiliki ciri-ciri perusahaan publik. Ini berarti, operasional perusahaan bebas dari pengawasan siapa pun. Perusahaan dapat menaati peraturan karena direksi di perusahaan tersebut merupakan pilihan pemerintah. Namun menjadi sorotan publik dibandingkan dengan perusahaan swasta lain karena masyarakat menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk menilai perusahaan publik tersebut. Selain itu, perusahaan milik pemerintah harusnya tidak hanya fokus pada kemakmuran pemegang saham, tetapi juga dituntut untuk bersedia melegitimasi perusahaan agar tetap berjalan stabil.

### **5.3 Dampak Kepemilikan Pemerintah dalam *Environmental Disclosure***

Dalam hal peraturan lingkungan, pemerintah dapat mencoba menekan perusahaan untuk mematuhi peraturan lingkungan dan

mengungkapkan kegiatan terkait dalam pelaporan mereka melalui kepemilikan pemerintah. Perusahaan milik pemerintah secara signifikan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah karena pendanaan sebagian besar atau bahkan keseluruhan berasal dari pemerintah. Pemerintah sebagai institusi sosial memiliki kekuasaan koersif dari negara melalui penegakan hukum untuk mengontrol perilaku aktor-aktor sosial lainnya, termasuk pada level organisasi (Alshbili *et al.*, 2020). Dengan demikian, kepemilikan pemerintah diharapkan dapat menciptakan tekanan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi tambahan, karena badan pemerintah dipercaya oleh publik dan perlu memenuhi harapan publik.

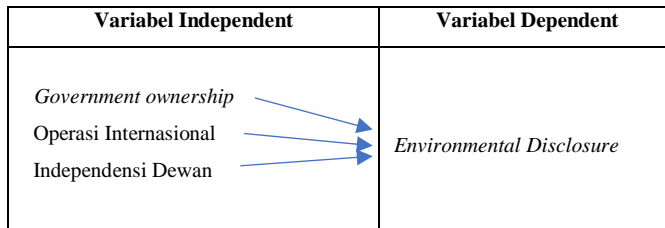
Terdapat diskusi menarik di antara para peneliti yang memiliki hasil beragam terkait pengaruh perusahaan dengan kepemilikan perusahaan terhadap kinerja lingkungan dan *environmental disclosure*. Sebagian menemukan hubungan positif di mana kepemilikan pemerintah secara signifikan dapat meningkatkan kinerja lingkungan dan *environmental disclosure* dikarenakan pengaruh tekanan yang diberikan oleh pemerintah untuk mempertahankan kepercayaan publik. Namun, sebagian menemukan hubungan negatif di mana semakin pemerintah terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan maka kinerja lingkungan dan *environmental disclosure*-nya juga akan semakin buruk. Seperti pada kasus Vietnam, Pham *et al.*, (2020) menemukan bahwa mayoritas perusahaan dimiliki oleh pemerintah. Namun intervensi yang dihasilkan justru semakin memperburuk kinerja lingkungan perusahaan karena bagian kepedulian terhadap lingkungan masih rendah dan belum menjadi prioritas pemerintah. Hasil kajian juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat keberagaman struktur

kepemilikan perusahaan (bukan hanya dimiliki oleh pemerintah saja) justru meningkatkan kemampuan pengungkapan lingkungan perusahaan di negara tersebut. Argumen tersebut diperkuat oleh Alshbili *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki sistem tata kelola yang buruk (yaitu negara dengan tingkat kecurangan dan korupsi yang tinggi) dapat menyebabkan praktik kinerja tanggung jawab sosial lingkungan yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik di perusahaan milik pemerintah merendahkan tindakan penegakan hukum melalui pejabat yang korup dan melemahkan regulasi dari otoritas. Diskusi tersebut membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pengungkapan lingkungan memiliki hasil yang berbeda dan bergantung pada komitmen pemerintah dan kondisi politik di masing-masing negara.

#### **5.4 Pendekatan *Research*: Perusahaan dengan Kepemilikan Pemerintah**

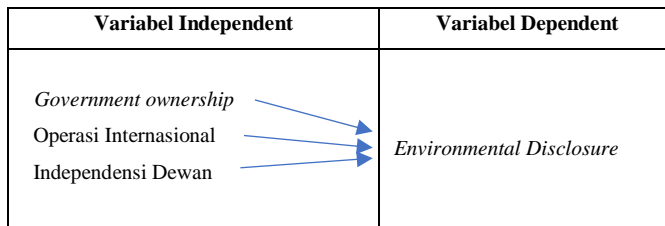
Pendekatan penelitian telah dilakukan dan dipublikasikan dalam Ifada & Indriastuti (2021) mengenai *government ownership* atau perusahaan dengan kepemilikan pemerintah. Data diambil menggunakan teknik metode *purposive sampling* dan diperoleh sejumlah 53 perusahaan publik di pasar berkembang (*emerging market*) yang memenuhi kriteria dengan data yang lengkap. Penelitian ini diadakan untuk menemukan hubungan antara *government ownership*, operasi internasional, independensi dewan, dan *environmental disclosure*. Berdasarkan pada kajian literatur, model awal penelitian telah terbentuk seperti pada tabel berikut.

**Tabel 7. Model awal penelitian perusahaan dengan kepemilikan pemerintah**



Pada model awal penelitian diperoleh tiga variabel independen yaitu *government ownership*, operasi internasional, dan independensi dewan; sedangkan *environmental disclosure* berperan sebagai variabel dependen. Ketiga variabel independen diharapkan memiliki hubungan yang positif untuk membantu *environmental disclosure* perusahaan.

**Tabel 8. Model akhir penelitian perusahaan dengan kepemilikan pemerintah**



Berdasarkan hasil pengujian ketiga variabel independen yaitu *government ownership*, operasi internasional, dan independensi dewan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Perusahaan milik pemerintah lebih ditonjolkan oleh masyarakat dan dianggap fokus pada kemakmuran pemegang saham dan bersedia memenuhi kebutuhan dan legitimasi pemerintah. Peraturan lingkungan pemerintah dapat menekan perusahaan untuk mematuhiya dan mengungkapkan aktivitas terkait dalam pelaporan.

Oleh karena itu, perusahaan yang memegang mayoritas saham pemerintah akan memberikan lebih banyak tanggung jawab lingkungan dan sosial. Hal ini disebabkan karena pemerintah memberikan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Kemudian terkait hubungan operasi internasional dan *environmental disclosure* di mana perusahaan dengan operasi internasional harus mampu beradaptasi secara sosial dan budaya termasuk berbagai perbedaan kebutuhan konsumen hingga peraturan negara yang dipantau oleh komunitas internasional. Operasi internasional memberikan peluang untuk mendapatkan banyak pemangku kepentingan yang akan semakin memberi tekanan pada perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan lebih proaktif tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga dapat meningkatkan *environmental disclosure* mereka.

Lalu, pengaruh independensi dewan pada pengungkapan lingkungan ditemukan memiliki hubungan yang positif. Perusahaan dengan independensi dewan tinggi memiliki pengungkapan lingkungan yang unggul dan sangat efektif. Hal ini karena perusahaan publik memungkinkan pemerintah memilih dewan direksinya sendiri sehingga dapat memberikan tekanan dan pengawasan pada pengungkapan lingkungan perusahaan. Perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan untuk menjaga citra perusahaan di mata pemangku kepentingan. Seorang komisaris independen dapat fokus pada investasi untuk keuntungan jangka panjang dengan meningkatkan kepedulian pada tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan

demikian, penelitian ini tidak mengubah prediksi kajian teoritik pada model awal.

## **5.5 Penutup**

Pemerintah merupakan pihak pengontrol yang berwenang untuk mengatur perusahaan agar tidak merusak lingkungan dengan aktivitas bisnisnya melalui berbagai peraturan perizinan, program unggulan seperti PROPER, undang-undang, dan evaluasi akhir untuk *reward* dan hukuman. Selain berperan sebagai pihak pengontrol, pemerintah juga dapat menjadi pemilik dari sebuah perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah merupakan salah satu bentuk struktur kepemilikan dalam perusahaan. Kepemilikan pemerintah berarti bahwa mayoritas modal atau saham berasal dari pemerintah. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan kepemilikan ini disebut dengan BUMN seperti Persero, Persero Terbatas, dan Perum.

Dalam peraturan lingkungan, pemerintah dengan kepemilikannya dalam sebuah perusahaan memiliki power yang “kuat” untuk memaksa dan menekan perusahaan untuk meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan pemerintah lebih banyak mendapatkan sorotan dari publik sehingga untuk menjaga citra perusahaan, pemerintah berkewajiban untuk proaktif dalam melaksanakan kepedulian terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Namun demikian, perlu disadari bahwa implementasi peran pemerintah menghasilkan intervensi yang berbeda (dapat berpengaruh positif dan negatif) bergantung pada komitmen pemerintah dan kondisi politik dari masing-masing negara.



Lebih lanjut, bab ini juga telah mengkonfirmasi hubungan *government ownership*, operasi internasional, independensi dewan, dan pengungkapan lingkungan perusahaan. Hasil penelitian menemukan variabel baru yang perlu mendapatkan perhatian ketika mengimplementasikan *environmental disclosure* di perusahaan yaitu *government ownership* dan operasi internasional. *Government ownership* mengenai perusahaan dengan kepemilikan pemerintah sedangkan operasi internasional mencerminkan kegiatan bisnis perusahaan yang dilaksanakan di berbagai negara.

## **BAB VI**

### **IMPLEMENTASI ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING (EMA)**

#### **6.1 Pentingnya *Environmental Management Accounting* (EMA)**

Evolusi industri telah membawa kekayaan dan kemakmuran yang tak terukur namun menyebabkan degradasi ekologi yang tidak disengaja seperti penggundulan hutan, pemanasan global, penurunan keanekaragaman hayati, dan limbah beracun. Industrialisasi dan produksi skala besar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia telah mengakibatkan konsumsi dan hasil yang merugikan, seperti berkurangnya sumber daya alam dan lingkungan serta merusak kesehatan manusia (Sandamini *et al.*, 2022). Karena dampak lingkungan menjadi lebih jelas, pembuat keputusan perusahaan dipaksa untuk menemukan solusi berkelanjutan dan jangka panjang baik di kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas dan bisnis itu sendiri (Nyahuna, 2022).

Setiap bisnis memiliki tanggung jawab di luar tanggung jawab dasarnya kepada pemegang saham. Saat ini masyarakat menjadi lebih sensitif terhadap isu perlindungan lingkungan, dan akuntansi memainkan peran penting dengan bertindak sebagai bahasa bisnis. Sebab itu, para manajer telah dipaksa untuk memasukkan akuntansi lingkungan ke dalam kegiatan bisnis mereka untuk memenuhi kegiatan lingkungannya. Sistem ini memungkinkan penggabungan akuntansi dan lingkungan dan lebih dikenal dengan istilah akuntansi manajemen lingkungan atau selanjutnya kita sebut sebagai *Environmental Management Accounting* (EMA).

EMA adalah sistem yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis lingkungan baik informasi keuangan maupun non-keuangan untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan lingkungan perusahaan secara bersamaan. Banyak alasan yang melatarbelakangi kemunculan EMA selain tekanan dari pemegang saham seperti standar yang disyaratkan dalam undang - undang yang harus dilampaui, reputasi perusahaan, ukuran perusahaan, dan kepuasan konsumen. Tujuan utama informasi EMA adalah untuk mendukung pengambilan keputusan internal dengan mengidentifikasi biaya lingkungan. Konsep EMA yang sehat menjadi inisiatif pengelolaan lingkungan yang meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan. Ciri-ciri konsep EMA yang sehat dapat dilihat melalui:

- a. Kemampuan dalam menggunakan manfaat finansial dan ekonomi dan penghematan biaya dari tindakan perlindungan lingkungan;
- b. Kemampuan mengidentifikasi jumlah perlindungan lingkungan yang optimal untuk mewujudkan kesuksesan finansial dan ekonomi yang maksimal.

Lebih lanjut, Ong *et al.* (2019) telah mengklasifikasikan indikator pengukuran EMA ke dalam beberapa aspek di antaranya:

1. Biaya Lingkungan, berhubungan dengan mengidentifikasi biaya terkait lingkungan; mengalokasikan biaya terkait lingkungan untuk proses produksi; mengalokasikan biaya terkait lingkungan ke produk; membuat dan menggunakan akun biaya terkait lingkungan; serta meningkatkan manajemen biaya terkait lingkungan.
2. Peraturan Lingkungan, berhubungan dengan kesesuaian dengan peraturan; memantau regulasi lingkungan; kesesuaian dengan prosedur lingkungan; dan memperbaiki regulasi lingkungan.

3. Keamanan Lingkungan, berhubungan dengan meningkatkan kesadaran lingkungan; kesesuaian dengan keamanan lingkungan; dan menyediakan persyaratan keamanan.
4. Komitmen Manajemen, berhubungan dengan meningkatkan prosedur untuk keamanan lingkungan; meningkatkan program lingkungan; serta terlibat dalam pengambilan keputusan lingkungan.
5. Fokus pada konsumen, berhubungan dengan mengurangi masalah lingkungan; meningkatkan kepuasan pelanggan; meningkatkan kebutuhan pelanggan; dan mendorong ramah lingkungan.

EMA muncul karena ketidakmampuan sistem akuntansi manajemen konvensional untuk menangkap masalah lingkungan. EMA dianggap sebagai jembatan antara akuntansi manajemen dan manajemen lingkungan. Akuntansi sebagai badan aturan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan memainkan peran penting dalam EMA dan pembangunan berkelanjutan. Peran ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa informasi akuntansi membentuk dasar dari keputusan manajemen. Umumnya, EMA fokus pada rencana, memantau target kinerja, berbagi praktik yang dapat diterima di seluruh organisasi, dan mengintegrasikannya dalam proses pelaporan keuangan untuk peningkatan kinerja. Oleh karenanya, untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan keuangan secara bersamaan, sangat penting untuk mengidentifikasi bagaimana manajer perusahaan memutuskan atau membuat keputusan tentang praktik EMA yang akan digunakan.

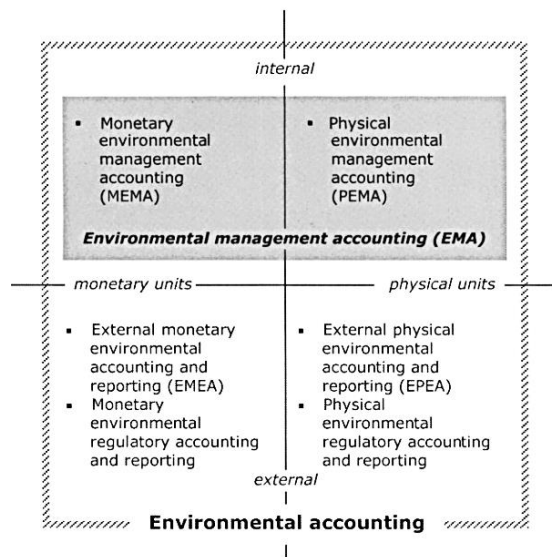
## **6.2 Kelompok dan Dimensi *Environmental Management Accounting* (EMA)**

Burritt *et al.* (2002, 2005) menyatakan bahwa berdasarkan jenis informasi, EMA terbagi menjadi dua kelompok yaitu dampak lingkungan pada situasi ekonomi perusahaan atau dikenal sebagai *Monetary Environmental Information* dan dampak perusahaan pada ekologi lingkungan atau dikenal sebagai *Physical Environmental Information*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. *Monetary Environmental Information*, merujuk pada semua dampak perusahaan pada stok dan arus keuangan masa lalu, sekarang atau masa depan yang dinyatakan dalam unit moneter misalnya, pengeluaran untuk produksi; biaya denda karena melanggar undang-undang lingkungan; nilai moneter dari aset lingkungan, dan lain-lain. Informasi ini digunakan dalam *Monetary Environmental Management Accounting* (MEMA). MEMA adalah sistem akuntansi dan alat yang menyediakan dasar untuk sebagian besar keputusan manajemen internal, melacak, dan menangani biaya dan pendapatan dalam bentuk moneter yang dikeluarkan karena dampak perusahaan pada lingkungan.
2. *Physical Environmental Information*, merujuk pada jumlah energi dan material di masa lalu, sekarang, dan masa mendatang yang berdampak pada ekologi lingkungan dalam satuan fisik seperti kilogram, meter kubik, atau Joule misalnya, kilogram bahan per pelanggan yang dilayani atau Joule energi yang digunakan per unit produk. Informasi ini digunakan dalam *Physical Environmental Management Accounting* (PEMA). PEMA sebagai pendekatan akuntansi lingkungan internal berfungsi sebagai: (1) alat analisis

yang dirancang untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan ekologis; (2) teknik pendukung keputusan terkait dengan menyoroti kualitas lingkungan relatif; (3) alat pengukuran yang merupakan bagian integral dari tindakan lingkungan lainnya seperti eko-efisiensi; (4) alat untuk mengendalikan konsekuensi lingkungan langsung dan tidak langsung; (5) alat akuntabilitas yang memberikan dasar netral dan transparan untuk komunikasi internal dan, tidak langsung, eksternal; dan (6) alat yang kompatibel dan saling melengkapi dengan seperangkat alat yang sedang dikembangkan untuk membantu mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis.

Berdasarkan pemahaman dasar akuntansi lingkungan, kumpulan sistem akuntansi lingkungan yang berbeda di atas dapat diposisikan dalam kerangka akuntansi sebagai berikut Gambar 1 dan Tabel 9 secara lebih detail (Burritt *et al.*, 2002, 2005).



**Gambar 1. Model Integrasi Akuntansi Lingkungan**  
 Sumber: (Burritt *et al.*, 2002, 2005)

MEMA meliputi:

- a. *Monetary Environmental Management Accounting* (MEMA) sebagai lingkungan internal akuntansi dinyatakan dalam satuan moneter;
- b. *External Monetary Environmental Accounting* (EMEA) sebagai lingkungan eksternal akuntansi dan pelaporan yang dinyatakan dalam satuan moneter; dan
- c. Akuntansi lingkungan moneter lainnya, seperti akuntansi pajak lingkungan.

Sedangkan PEMA meliputi:

- a. *Physical Environmental Management Accounting* (PEMA) sebagai lingkungan internal akuntansi dinyatakan dalam satuan fisik;
- b. *External Physical Environmental Accounting* (EPEA) sebagai akuntansi lingkungan eksternal dalam satuan fisik; dan
- c. Akuntansi lingkungan fisik lainnya, seperti akuntansi lingkungan peraturan dalam satuan fisik.

**Tabel 9. Kerangka dan alat detail EMA**

		EMA			
		MEMA		PEMA	
		Fokus Jangka Pendek	Fokus Jangka Panjang	Fokus Jangka Pendek	Fokus Jangka Panjang
<b>Orientasi Masa Lampau</b>	<b>Pengumpulan informasi rutin</b>	Akuntansi biaya lingkungan (misalnya biaya variabel, biaya penyerapan, dan biaya berdasarkan aktivitas)	Pengeluaran modal dan pendapatan yang didorong oleh lingkungan	Akuntansi aliran material dan energi (dampak jangka pendek terhadap lingkungan – tingkat produk, lokasi, divisi, dan perusahaan)	Akuntansi dampak modal lingkungan (atau alam)
	<b>Pengumpulan informasi ad hoc (berdasarkan kebutuhan)</b>	Penilaian ex post dari keputusan penetapan biaya lingkungan yang relevan	Biaya siklus hidup lingkungan (dan target) Penilaian pasca investasi untuk masing-masing proyek	Penilaian ex post dari dampak lingkungan jangka pendek (misalnya situs atau produk)	Persediaan siklus hidup Pasca investasi penilaian investasi lingkungan fisik

		EMA			
		MEMA		PEMA	
		Fokus Jangka Pendek	Fokus Jangka Panjang	Fokus Jangka Pendek	Fokus Jangka Panjang
Orientasi Masa Depan	Pengumpulan informasi rutin	Penganggaran operasional lingkungan moneter (aliran) Penganggaran modal lingkungan moneter (saham)	Perencanaan keuangan jangka panjang lingkungan	Penganggaran lingkungan fisik (aliran dan stok) (misalnya penganggaran berbasis aktivitas aliran material dan energi)	Perencanaan lingkungan fisik jangka panjang
	Pengumpulan informasi ad hoc (berdasarkan kebutuhan)	Biaya lingkungan yang relevan (misalnya pesanan khusus, bauran produk dengan batasan kapasitas)	Penilaian investasi proyek lingkungan moneter Penganggaran siklus hidup lingkungan dan penetapan harga target	Dampak lingkungan yang relevan (misalnya mengingat kendala jangka pendek pada kegiatan)	Penilaian investasi lingkungan fisik Analisis siklus hidup proyek tertentu

Sumber: (Burritt *et al.*, 2002, 2005)

Berdasarkan tabel di atas terdapat kelima dimensi yang terkandung dalam kerangka EMA di antaranya: internal vs. eksternal; klasifikasi fisik vs. moneter, kerangka waktu masa lalu dan masa depan, jangka pendek dan panjang, dan pengumpulan informasi ad hoc vs. rutin. Alat akuntansi ini dapat ditetapkan berdasarkan skema klasifikasi yang dibuat oleh lima dimensi ini.

### 6.3 Hubungan Strategi Lingkungan, Sistem Pengendalian Lingkungan, dan *Environmental Management Accounting* (EMA)

Strategi lingkungan mengarah sebagai serangkaian inisiatif yang dapat mengurangi dampak kegiatan bisnis terhadap lingkungan melalui produk, proses, dan kebijakan perusahaan seperti pengurangan konsumsi energi dan limbah, penggunaan *green resource* yang berkelanjutan, dan penerapan sistem manajemen lingkungan. Isu



lingkungan yang memicu kemampuan perusahaan untuk menetapkan strategi lingkungan yang proaktif menjadi perhatian manajemen saat ini. Perusahaan yang memiliki strategi orientasi proaktif mengarah pada peningkatan kinerja lingkungan yang akan memunculkan berbagai penggunaan indikator kinerja lingkungan seperti strategi pengembangan lingkungan proaktif, sistem informasi lingkungan dan sistem pengendalian manajemen lingkungan.

Penggunaan EMA dan sistem pengendalian lingkungan di perusahaan menjadi bagian dari strategi lingkungan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif (Latan *et al.*, 2018). EMA merupakan pendekatan untuk mengungkapkan informasi yang membantu perusahaan memenuhi tanggung jawab terhadap lingkungan serta mencapai kinerja lingkungan dan keuangan yang lebih baik. Sedangkan sistem pengendalian manajemen lingkungan mengacu pada seperangkat aturan formal, rutinitas dan prosedur berbasis informasi yang digunakan manajer untuk mempertahankan atau mengubah pola dalam kegiatan organisasi, khususnya mengenai aspek lingkungan dari kinerja organisasi (Gibassier & Alcouffe, 2018). Sistem pengendalian lingkungan ini memastikan manajer menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mempromosikan kinerja lingkungan. Selain itu, sistem pengendalian ini menjadi strategi keberlanjutan yang kuat untuk melihat lebih dalam kontrol administratif dan dapat diimplementasikan dalam budaya perusahaan sehingga dapat menjadi kontrol yang kuat untuk penanaman kepedulian lingkungan dalam perusahaan. Dengan demikian, keduanya dirancang untuk memenuhi tujuan perusahaan dalam rangka mencapai kinerja lingkungan yang berkelanjutan.

#### **6.4 *Environmental Management Accounting (EMA)* dan Kinerja Lingkungan**

Area utama untuk penerapan EMA adalah dalam penetapan harga produk, penganggaran, penilaian investasi, penghitungan biaya, dan penghematan proyek lingkungan, atau penetapan target kinerja terukur. Perusahaan yang menerapkan EMA dan mengupayakan kinerja lingkungan yang baik akan menggunakan berbagai program lingkungan yang mengurangi penggunaan sumber daya alam di lini produksi, biaya produksi lebih rendah, dan meningkatkan produktivitas. Komitmen terhadap praktik EMA yang kuat berpotensi meningkatkan efisiensi perusahaan untuk mengurangi biaya operasi dan mengoptimalkan konsumsi energi dan sumber daya. Alhasil, kinerja lingkungan yang didukung oleh praktik EMA yang baik akan memberikan efek positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan sekaligus mencapai keberlanjutan.

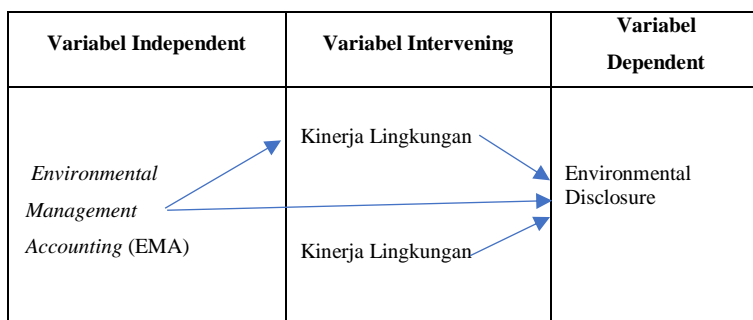
Lebih lanjut, perusahaan memperkuat legitimasi mereka di masyarakat dengan menerapkan proses dan prosedur dalam operasi bisnis yang ramah lingkungan, memenuhi harapan masyarakat, dan mengungkapkan informasi ini dalam laporan tahunan. Penerapan EMA telah mengubah praktik pelaporan perusahaan dan diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana fungsi pengelolaan lingkungan di dalam perusahaan dapat tercermin dan dibagikan kepada masyarakat. Perusahaan yang mengungkapkan informasi lingkungan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan mereka. Lalu secara umum, EMA memberikan fasilitas baik dalam pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari analisis biaya dan

manfaat lingkungan termasuk mengungkapkan informasi tersebut kepada pemangku kepentingan. Diskusi ini membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwa pada akhirnya praktik EMA dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan pengukuran informasi lingkungan perusahaan.

### 6.5 Pendekatan *Research: Environmental Management Accounting (EMA)*

Pendekatan penelitian telah dilakukan mengenai *Environmental Management Accounting (EMA)*. Data yang diperoleh 492 perusahaan publik di kawasan Asia-Pasifik yang diambil dari tahun 2007 hingga 2019. Penelitian ini diadakan untuk menemukan hubungan antara *Environmental Management Accounting (EMA)*, kinerja lingkungan dan *environmental disclosure*. Berdasarkan pada kajian literatur, model awal penelitian telah terbentuk seperti pada tabel berikut.

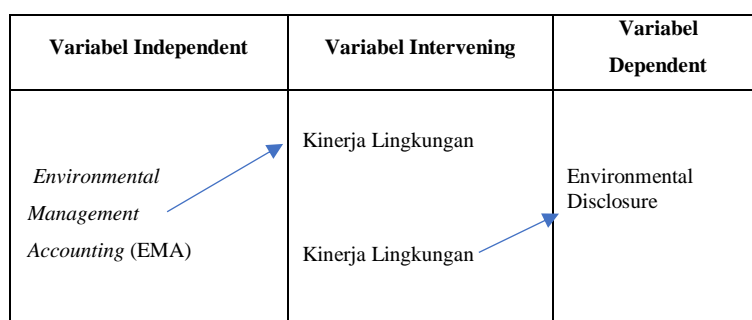
**Tabel 10. Model awal penelitian *Environmental Management Accounting (EMA)***



Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama yaitu EMA sebagai variabel independen, kinerja lingkungan sebagai variabel intervening, dan environmental disclosure sebagai variabel dependen.

Penelitian diadakan untuk mengetahui empat kondisi di antaranya: pengaruh EMA pada kinerja lingkungan; EMA pada *environmental disclosure*; kinerja lingkungan pada *environmental disclosure*; serta untuk mengetahui apakah kinerja lingkungan menjadi variabel mediasi yang mempengaruhi hubungan tidak langsung EMA dan *environmental disclosure*.

**Tabel 11. Model akhir penelitian *Environmental Management Accounting (EMA)***



Setelah pengujian didapatkan dua hipotesis yang tidak berpengaruh signifikan yaitu pengaruh EMA pada *environmental disclosure*; dan pengaruh kinerja lingkungan dalam memediasi hubungan EMA pada *environmental disclosure*. Hal ini mengindikasikan bahwa baik dalam pengaruh secara langsung maupun tidak langsung EMA justru tidak dapat berpengaruh pada pengungkapan lingkungan perusahaan. Implementasi EMA memberikan informasi akuntansi lingkungan yang berguna untuk membuat keputusan ekonomi namun perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi lingkungan jika penerapan EMA mengarah pada peningkatan kinerja lingkungan. Selain itu, sifat pelaporan yang sukarela menyebabkan perusahaan memiliki keleluasaan untuk melaporkan atau tidak melaporkan

informasi tersebut. Hal tersebut menyebabkan perusahaan menjadi lebih selektif dalam mengungkapkan informasi ke publik serta tidak melakukan *greenwashing* dengan tidak melaporkan informasi yang tidak perlu secara berlebihan.

Lebih lanjut, dua hipotesis lain yang ditemukan memiliki pengaruh signifikan adalah pengaruh EMA pada kinerja lingkungan; dan pengaruh kinerja lingkungan pada *environmental disclosure*. EMA mendorong efisiensi dalam pengelolaan lingkungan khususnya pada efisiensi biaya sehingga tidak mengganggu profitabilitas yang dimiliki. EMA pada akhirnya mengarah pada peningkatan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan. Lalu, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan melaporkan informasi lingkungan kepada publik agar investor dan pemangku kepentingan lainnya mendapat informasi tentang inisiatif lingkungan perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata publik.

## **6.6 Penutup**

Perkembangan industri dalam memenuhi kebutuhan manusia melahirkan kemakmuran sekaligus secara sengaja maupun tidak sengaja menghasilkan degradasi lingkungan. Sensitivitas masyarakat dan pemangku kepentingan menekan perusahaan untuk berusaha mencari solusi dan mencapai keberlanjutan. Kondisi ini memunculkan peran akuntansi untuk dilibatkan dalam manajemen lingkungan perusahaan. EMA terbukti menjadi alat yang efisien yang menggabungkan kapasitas produktif dan kemampuan teknologi informasi, manajemen dan akuntansi untuk memenuhi tujuan organisasi

dan lingkungan perusahaan. Aspek EMA berguna dalam memberikan pengelolaan ekologi dengan menyediakan ketersediaan data internal dan eksternal untuk memperkuat keputusan lingkungan dan perusahaan. EMA menjadi bagian dari strategi lingkungan perusahaan yang bertugas untuk memastikan efisiensi biaya lingkungan. Selain itu, dalam prosesnya, sistem pengendalian lingkungan bertugas untuk memastikan implementasi EMA berjalan sesuai prosedur yang ada.

Bab ini telah mengkonfirmasi hubungan EMA, kinerja lingkungan, dan *environmental disclosure*. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan aspek yang membantu meningkatkan *environmental disclosure* yaitu kinerja lingkungan dan kinerja lingkungan yang diperkuat oleh implementasi sistem EMA.

## **BAB VII**

### **URGENSI *INSTITUTIONAL PRESSURE* PADA PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN**

#### **7.1 Teori Kelembagaan**

Meningkatnya masalah lingkungan berbanding lurus dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak kepada perusahaan. Saat ini perusahaan berada di bawah tekanan untuk membuat operasi bisnis yang ramah lingkungan secara berkelanjutan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah atau berkolaborasi dengan perusahaan lainnya. Banyak perusahaan menghadapi tekanan tersebut dengan mengontrol dampak negatif operasi bisnis pada lingkungan dan menyediakan informasi tentang lingkungan untuk memuaskan pengguna internal dan eksternal yang membutuhkan. Dengan kata lain, mereka harus mencapai kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan saat menghadapi tekanan *institutional* yang datang atau selanjutnya kita sebut sebagai *institutional pressure*.

*Institutional pressure* muncul dari sebuah teori bernama teori kelembagaan atau teori *institutional*. Teori ini diterjemahkan oleh beberapa peneliti sebagai teori yang digunakan untuk memahami berbagai faktor eksternal yang mengajak perusahaan untuk mengadopsi dan memulai suatu praktik baru (Saeed *et al.*, 2018); mengarah pada wawasan kritis dan alasan khusus yang berdampak pada pengambilan keputusan perusahaan termasuk bagaimana perusahaan mendapatkan legitimasi atau pengakuan dengan mengikuti norma dan perilaku yang umum (Lee *et al.*, 2022); juga mendeskripsikan berbagai tekanan yang membuat perusahaan mengambil sebuah langkah perubahan

(Wongthongchai & Saenchaiyathon, 2019). Dari diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa teori kelembagaan merupakan wawasan kritis dan alasan khusus dari berbagai faktor eksternal yang menekan dan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengadopsi praktik baru dalam bisnis untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan.

Institutional atau kelembagaan merupakan sebuah proses di mana organisasi atau aktor individu memperoleh dan memelihara seperangkat makna, keyakinan, praktik, dan nilai-nilai yang jika digabungkan, cenderung mengarah pada ke keragaman perilaku (Negash & Lemma, 2020). Selain memiliki sistem produksi, lembaga atau institusi atau organisasi bahkan perusahaan merupakan bagian dari sistem dengan budaya mereka sendiri. Keputusan perusahaan diambil berdasarkan pada seperangkat norma, budaya, dan perilaku di bawah pengaruh lingkungan eksternal. Hal ini merujuk pada kondisi ketika semua organisasi atau perusahaan pada lingkup industri yang sama mengadopsi praktik yang dilembagakan secara umum, dengan pengambilan keputusan yang serupa, maka saat itu mereka sedang melegitimasi diri mereka sendiri (Saeed *et al.*, 2018). Lalu, legitimasi ini disadari oleh perusahaan berbanding lurus dengan total keuntungan ekonomi yang akan di dapatkan sehingga memperhatikan faktor *institutional pressure* menjadi hal penting penunjang keberhasilan. Total keuntungan ekonomi yang didapatkan berasal dari pengakuan dan kepercayaan pihak eksternal atas implementasi tuntutan dan desakan yang diajukan. Walaupun demikian, pemenuhan tuntutan yang berdampak pada sosial dan lingkungan menjadi orientasi utama sebelum keuntungan ekonomi perusahaan tersebut.



## 7.2 Jenis *Institutional Pressure*

*Pressure* merujuk pada tekanan atau desakan atau tuntutan yang kuat. Dalam teori kelembagaan, tekanan dipetakan menjadi tiga jenis yaitu tekanan koersif, tekanan normatif, dan tekanan mimetik. Berikut adalah penjelasannya:

**Tekanan koersif**, merupakan serangkaian tekanan formal atau informal dari organisasi yang berpengaruh di mana perusahaan bergantung karena sumber daya tertentu atau karena mematuhi hukum, atau bahkan harapan masyarakat. Tekanan koersif cenderung dimulai dalam Undang-Undang, peraturan, dan praktik. Perusahaan yang tidak mengikuti dapat dihukum dan dipaksa menjalani tindakan disipliner yang tegas. Tekanan-tekanan ini dapat berupa ajakan oleh badan-badan industri untuk bergabung dengan mereka dalam rangka mendapatkan keuntungan, atau untuk dilarang/denda karena tidak mematuhi Undang-Undang atau peraturan pemerintah tertentu.

**Tekanan normatif**, merujuk pada hasil dari norma dan standar tertentu yang diformalkan oleh lingkungan atau ekspektasi budaya terhadap lingkungan tertentu. Dalam hal ini perusahaan berada di bawah tekanan untuk menentukan atau membentuk operasi mereka sendiri untuk mencapai daya saing dan tetap bertahan di industri. Tekanan normatif datang dari asosiasi industri, asosiasi perdagangan, media, dan aktor sosial lainnya seperti pemasok dan pelanggan yang memungkinkan perusahaan untuk belajar tentang inovasi bersama dengan manfaat dan biaya asosiasi mereka. Kelompok yang berbeda dapat menjadi sumber tekanan normatif termasuk institusi pendidikan yang menanamkan perilaku kognitif; profesional dari kelompok dan

asosiasi industri; lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkepentingan dengan industri tertentu; dan masyarakat umum.

**Tekanan mimetik**, berperan dalam mendorong perusahaan untuk menghindari ketidakpastian dan risiko dengan meniru atau mereplikasi proses atau struktur perusahaan lain yang sukses. Jika terjadi perubahan signifikan dalam lingkungan eksternal yang menimbulkan ancaman bagi keberadaannya, perusahaan mencari panutan yang mereka yakini berhasil menghadapi tantangan eksternal tersebut untuk mencoba memodifikasi diri sesuai dengan model organisasi tersebut. Hasil peniruan dapat dikenali dalam bentuk penyebaran kesamaan antar perusahaan.

Teori institusional menggambarkan perubahan yang muncul di dalam perusahaan karena situasi yang menyebabkan tekanan tidak langsung. Untuk menciptakan sebuah perusahaan yang efektif, teori kelembagaan memberikan gambaran tentang tiga faktor untuk dipelajari yaitu dukungan manajemen puncak, tekanan pesaing, dan tekanan pelanggan.

Penanganan **manajemen puncak** atas kebijakan organisasi dan manajemen strategis mereka menentukan pedoman perusahaan untuk beroperasi di berbagai bidang untuk mencapai tujuan. Selain dukungan manajemen yang diungkapkan melalui kebijakan, peraturan, dan arah yang mereka ambil dengan organisasi, sumber daya yang mereka sediakan untuk mendukung kegiatan operasional juga penting, termasuk dana, tenaga, dan waktu.

Lalu, **pesaing** bisnis di industri yang sama menciptakan tekanan untuk meningkatkan proses efisiensi dan kualitas produk. Karena tekanan dari persaingan ini juga, perusahaan dapat meningkatkan

kemampuan untuk belajar dan meniru pesaing dengan kinerja yang lebih baik.

Kemudian, **permintaan pelanggan** telah menjadi faktor utama dalam menentukan desain produk dan proses. Permintaan pelanggan adalah masalah yang sangat penting untuk bagi perusahaan terutama dalam menanggapi dan memenuhi kepuasan pelanggan. Dalam konteks lingkungan, permintaan pelanggan dapat mencakup tuntutan untuk mempublikasikan informasi tentang praktik perusahaan, tentang bagaimana produk dirancang agar ramah lingkungan, dan tentang strategi pengelolaannya. Karenanya, pelanggan memainkan peran kunci dalam keputusan strategis perusahaan.

### **7.3 Dampak *Institutional Pressure* Pada Konteks Lingkungan di Perusahaan**

Tekanan institusional memiliki peran penting dalam kinerja lingkungan, penentu strategi lingkungan, dan penerapan *Environmental Management Accounting* (EMA). Misalnya, adanya peraturan hukum yang mengharuskan perusahaan untuk melaporkan secara terbuka pilihan pembuangan limbah mereka akan mendorong perusahaan untuk secara aktif mencari pengurangan limbah sehingga menghasilkan kinerja lingkungan yang lebih baik. Secara spesifik, tekanan institusional adalah kekuatan yang diterapkan oleh masyarakat, profesi, pemerintah, dan badan reguler pada organisasi untuk menerapkan praktik pengelolaan lingkungan. Dengan kata lain tekanan institusional menjadi faktor penentu dalam pembuatan strategi lingkungan (*Kong et al.*, 2022). Lebih lanjut, Wang *et al.* (2019) juga telah menjelaskan

peran serta jenis tekanan koersif, normatif, dan mimetik pada penerapan EMA dalam perusahaan. Berikut adalah penjelasannya:

Pada kasus **tekanan koersif** yang dilakukan oleh pemerintah dan mitra yang kuat, perusahaan diberikan mandat untuk mengikuti praktik bisnis berdasarkan standar dan peraturan yang ditetapkan. Standar dan peraturan tersebut dapat bersifat wajib atau bersifat insentif dan mempengaruhi perusahaan untuk berperilaku ramah pada lingkungan. Setiap perusahaan mengikuti peraturan tanpa syarat karena mengetahui fakta bahwa mereka akan dihukum jika mereka melanggar kebijakan dan peraturan sedangkan pada mekanisme insentif, perusahaan akan mendapatkan beberapa insentif jika bersedia mengikuti kebijakan lingkungan tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan EMA dengan menetapkan tujuan yang menguntungkan. Lalu ketika perusahaan menghadapi tekanan koersif, implementasi EMA dapat membantu mereka untuk mendapatkan dukungan pemerintah, legitimasi sosial, dan manfaat ekonomi.

**Tekanan normatif** datang dari asosiasi industri, asosiasi perdagangan, media, dan aktor sosial lainnya seperti pemasok dan pelanggan. Pihak-pihak tersebut memainkan peran penting dalam menciptakan norma-norma dasar untuk pelaksanaan EMA. Perusahaan dapat memperoleh sumber daya, pengetahuan, dan keahlian manajemen yang lebih baik melalui komunikasi dengan manajer organisasi lain dan pejabat pemerintah. Maka itu, perusahaan akan memilih untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada untuk menghindari hubungan buruk dengan mitra. Selain itu, di bawah tekanan dari media dan aktor sosial lainnya, perusahaan akan menerapkan EMA untuk menanggapi keprihatinan publik terhadap lingkungan. Apabila

perusahaan tidak menerapkannya maka reputasi mereka akan rusak, dan mereka mungkin akan kehilangan sumber daya eksternal, seperti pembiayaan bank. Pada akhirnya situasi ini membuat perusahaan bersedia menerapkan EMA untuk mendapatkan reputasi dan keuntungan jangka panjang.

**Tekanan mimetik** terjadi ketika perusahaan menghadapi masalah dengan ketidakpastian, perusahaan mempelajari bagaimana pesaing lain beroperasi dan meniru kesuksesan mereka. Terlebih lagi, dikarenakan implementasi EMA saat ini mahal dengan tingkat pengembalian finansial tidak pasti maka sangat penting untuk belajar dari kesuksesan kompetitor. Sehingga, apabila pesaing mendapat manfaat dari penerapan EMA, perusahaan dapat meniru praktik tersebut. Kemudian, proses replikasi yang dilakukan akan menghemat biaya eksplorasi dan meminimalkan biaya eksperimen yang dikeluarkan oleh perusahaan.

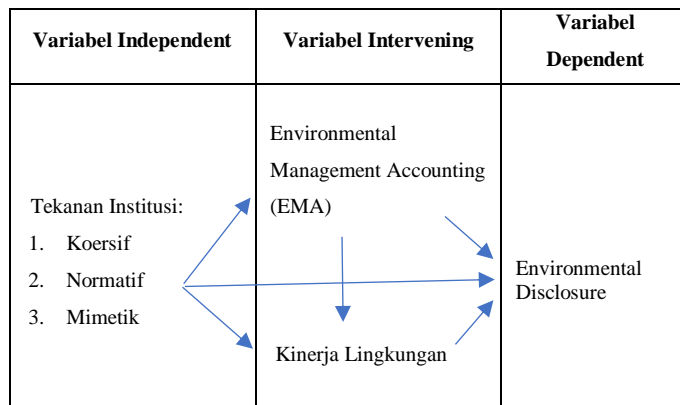
Meskipun teori institusional memberikan kerangka teoritis yang sesuai untuk memahami peran tekanan institusional dalam mempengaruhi kinerja lingkungan namun masih terdapat keterbatasan (Lee *et al.*, 2022). Teori institusional cenderung mengaitkan heterogenitas antar perusahaan dalam bidang yang berbeda. Namun, gagal untuk menjelaskan heterogenitas dalam kinerja lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan meskipun mereka berasal dalam lingkungan kelembagaan yang sama. Pemahaman kinerja lingkungan yang heterogen ini mungkin dapat disebabkan oleh karakteristik perusahaan itu sendiri seperti proses pembelajaran perusahaan, pelatihan, dan sumber daya perusahaan. Dengan kata lain tekanan institutional akan memberikan dampak yang berbeda-beda pada setiap kinerja lingkungan

perusahaan karena bergantung pada karakteristik dan daya pembelajaran perusahaan.

#### 7.4 Pendekatan *Research*: Tekanan Institusi

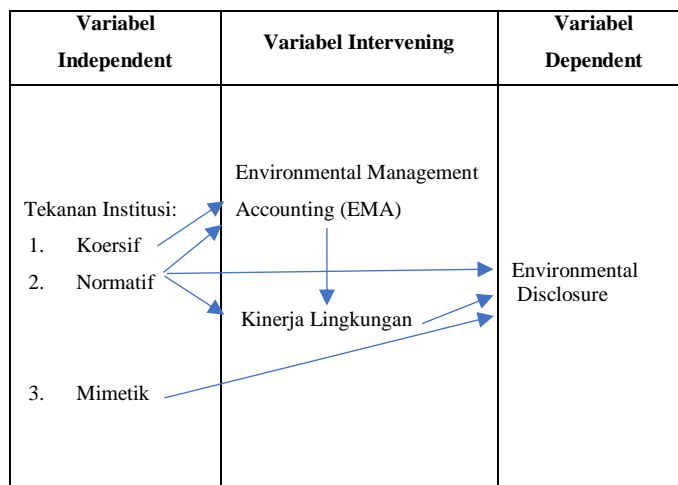
Pendekatan penelitian telah dilakukan mengenai tekanan institusi. Penelitian menggunakan populasi dari 19.750 perusahaan publik seluruh pasar di Negara Berkembang Asia Pasifik. Data diambil dari *Bloomberg*. Berdasarkan metode *purposive sampling* dengan kriteria (1) memiliki data kepemilikan pemerintah; (2) *leverage*; (3) jenis industri; (4) operasi internasional perusahaan; (5) fokus memperhatikan lingkungan; (6) independensi dewan; (7) biaya akuntansi lingkungan; (8) indikator kinerja lingkungan utama seperti udara, limbah, air, energi; (9) skor pengungkapan lingkungan maka diperoleh sampel sebanyak 80 perusahaan untuk tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tekanan institusi, *Environmental Management Accounting* (EMA), kinerja lingkungan, dan pengungkapan lingkungan. Berdasarkan pada kajian literatur, model awal penelitian telah terbentuk seperti pada tabel berikut.

**Tabel 12. Model awal penelitian tekanan institusi**



Pada model awal, penelitian ini melibatkan empat variabel utama yaitu tekanan institusi (terdiri dari koersif, normatif, dan mimetik) sebagai variabel independen, EMA dan kinerja lingkungan sebagai variabel intervening, serta *environmental disclosure* sebagai variabel dependen. Terdapat 6 kondisi yang dikonfirmasi yaitu mengenai (1) hubungan tekanan institusi (terdiri dari koersif, normatif, dan mimetik) pada EMA; (2) hubungan tekanan institusi (terdiri dari koersif, normatif, dan mimetik) pada kinerja lingkungan; (3) hubungan EMA dan kinerja lingkungan; (4) hubungan tekanan institusi (terdiri dari koersif, normatif, dan mimetik) pada *environmental disclosure*; (5) hubungan EMA pada *environmental disclosure*; dan (6) hubungan kinerja lingkungan pada *environmental disclosure*.

**Tabel 13. Model akhir penelitian tekanan institusi**



Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil model akhir seperti pada tabel. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

Dalam hubungan tekanan institusi dan EMA, terdapat tekanan koersif dan tekanan normatif yang berpengaruh. Apabila tekanan koersif (dengan *leverage* %) dan tekanan normatif (dengan pengukuran fokus memperhatikan lingkungan) meningkat maka penggunaan EMA juga akan meningkat. Ini artinya semakin tinggi tekanan dari kreditor, maka investasi perusahaan yang berorientasi pada lingkungan juga semakin meningkat. Penggunaan *green credit* yang berlaku pada sebagian besar sampel menjadi bukti peran tekanan koersif berupa *leverage* pada EMA. Selain itu, semakin lama perusahaan berfokus pada lingkungan maka akan meningkatkan alokasi EAC untuk program lingkungan perusahaan, sehingga tekanan normatif berupa fokus terhadap lingkungan berdampak positif terhadap penggunaan EMA pada perusahaan.

Dalam hubungan tekanan institusi dan kinerja lingkungan, terdapat tekanan normatif yang berpengaruh. Apabila tekanan normatif (dengan pengukuran independensi dewan) meningkat maka kinerja lingkungan juga akan meningkat. Ini artinya, semakin banyak komposisi independensi dewan pada perusahaan yang menjadi pemantau efektif pada sumber daya maka kinerja lingkungan juga akan meningkat. Perusahaan baik yang memiliki profil rendah maupun profil tinggi dalam sampel data penelitian ditemukan memiliki rata-rata kinerja lingkungan yang cukup tinggi.

Dalam hubungan EMA dan kinerja lingkungan, ditemukan EMA (diukur melalui biaya akuntansi lingkungan) memiliki dampak yang positif pada kinerja lingkungan. EMA merupakan bagian sistem manajemen lingkungan yang menyebabkan pengambilan keputusan pada pemeliharaan dengan mempertimbangkan penggunaan biaya dan



pencapaian profitabilitas perusahaan yang efektif dan efisien. Karenanya, penggunaan EMA mendorong perusahaan untuk mencapai kinerja lingkungan yang baik.

Dalam hubungan tekanan institusi pada *environmental disclosure*, terdapat tekanan normatif dan tekanan mimetik yang berpengaruh. Apabila tekanan normatif (dengan pengukuran independensi dewan) dan tekanan mimetik (dengan pengukuran jenis industri) meningkat maka pengungkapan lingkungan perusahaan juga akan meningkat. Ini artinya proporsi independensi dewan dalam perusahaan menentukan kemauan perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan kepada publik. Selain itu, tekanan dari independensi dewan merupakan aspek yang tidak dapat dikesampingkan oleh perusahaan. Kemudian, penelitian juga telah mengkonfirmasi bahwa perusahaan dengan profil tinggi memiliki pengungkapan lingkungan lebih baik dibandingkan perusahaan industri profil rendah. Dengan profil tinggi perusahaan lebih banyak mendapatkan perhatian dari publik sehingga menyebabkan tumbuhnya tanggung jawab yang lebih besar pada lingkungan.

Dalam hubungan EMA pada *environmental disclosure* ditemukan hubungan yang tidak berpengaruh. Ini dapat diartikan bahwa alokasi biaya akuntansi lingkungan belum tentu dapat meningkatkan pengungkapan lingkungan oleh perusahaan. Hal tersebut dapat disebabkan karena perusahaan belum mampu mengaplikasikan penggunaan EMA pada pengungkapan lingkungan perusahaan atau karena sifat EMA yang menyebabkan efektivitas dan efisiensi biaya lingkungan dan profit sehingga perusahaan memiliki hak untuk

membatasi pengungkapan pada informasi yang benar-benar dianggap penting oleh perusahaan.

Dalam hubungan kinerja lingkungan pada *environmental disclosure* ditemukan hubungan yang positif, serta kinerja lingkungan menjadi faktor yang memediasi hubungan tekanan normatif (dengan pengukuran independensi dewan) pada *environmental disclosure*. Ini artinya perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang tinggi tentu saja memiliki pengungkapan lingkungan yang baik pula. Lalu pada peran mediasi, tekanan dari independensi dewan mendesak perusahaan untuk memberikan kinerja lingkungan terbaik terlebih dahulu sehingga pada akhirnya berdampak pada pengungkapan lingkungan yang semakin baik.

## **7.5 Penutup**

Semakin berkembangnya industrialisasi maka semakin tinggi pula degradasi lingkungan yang dihasilkan. Lalu, masalah tersebut berbanding lurus dengan tekanan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada perusahaan. Hasilnya, perusahaan harus bersedia menghadapi tekanan tersebut di tengah usahanya mencapai kinerja lingkungan dan kinerja keuangan. *Institutional pressure* merupakan desakan kuat dari faktor eksternal. *Institutional pressure* muncul dari teori institusional di mana perusahaan dipaksa untuk mempraktikkan pendekatan baru dengan berbagai alasan khusus dari faktor eksternal untuk mendapatkan legitimasi.

Dalam teori institusional, tekanan telah dipetakan menjadi tiga jenis yaitu tekanan koersif, tekanan normatif, dan tekanan mimetik. Tekanan koersif berasal dari peraturan yang harus ditaati. Biasanya

berasal dari lembaga-lembaga asosiasi yang memiliki kuasa dan juga pemerintah. Kemudian tekanan normatif berasal dari tuntutan profesionalisme seperti tekanan pemasok dan pelanggan. Lalu, tekanan mimetik berasal dari tekanan pesaing yang memiliki kinerja lebih baik sehingga menyebabkan perusahaan melakukan replikasi praktik yang diimplementasi untuk menghindari risiko atas ketidakpastian.

Bab ini mengkonfirmasi dampak dari tekanan institusi melalui sebuah penelitian. Hasilnya tekanan normatif terindikasi sebagai aspek yang mempengaruhi penggunaan EMA, kinerja lingkungan, dan pengungkapan lingkungan. Lalu tekanan koersif ditemukan hanya berdampak pada penggunaan EMA sedangkan tekanan mimetik hanya berdampak secara signifikan pada pengungkapan lingkungan. Dari hasil penelitian tersebut maka aspek baru yang mempengaruhi *environmental disclosure* telah ditemukan dan harus mendapatkan perhatian perusahaan yaitu tekanan institusi berupa tekanan koersif, tekanan normatif, dan tekanan mimetik.

## **BAB VIII**

### **SHAREHOLDERS VALUE**

#### **8.1 Teori *Shareholder Value***

*Shareholder value* merujuk pada nilai yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Nilai ini menjadi pengembalian atas saham yang ditanamkan dalam perusahaan yang dapat berupa kenaikan harga saham dan pembagian deviden perusahaan. Teori *shareholders value* merujuk pada sebuah teori di mana perusahaan diharapkan dapat memaksimalkan nilai pemegang saham melalui aktivitas bisnisnya. Menurut Ward, (2020) penyebab awal perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan *shareholders value* disebabkan oleh beberapa hal yaitu perubahan struktur bisnis, lingkungan ekonomi, dan finansialisasi pasar.

Pertama, **struktur bisnis dan lingkungan ekonomi** memegang peran yang krusial dalam pengembangan teori. Pada abad 18 muncul kebutuhan besar atas investasi modal untuk menjalankan operasional perusahaan di mana kebutuhan ini telah mengubah pandangan tradisional yang menyebabkan perubahan kepemilikan perusahaan, yang awalnya kepemilikan berbasis keluarga menjadi perusahaan milik publik karena ada keterlibatan para investor.

Struktur bisnis ini telah berbanding lurus dengan perubahan lingkungan bisnis di mana manajerial perusahaan diarahkan untuk mengintegrasikan perusahaan, teknologi, dan perencanaan. Namun ketika fokus utama perusahaan berubah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, justru terjadi masalah di bagian internal perusahaan. Masalah ini terjadi karena kinerja manajerial yang buruk akibat

manajer dan direksi mengambil keputusan yang lebih menguntungkan kepentingan pribadi mereka.

Kedua, **pengaruh finansialisasi dari pasar**. Lembaga keuangan menjadi investor utama dalam kepemilikan saham di berbagai perusahaan selama tahun 1980. Mereka menuntut pengembalian tinggi dan menyebabkan tumbuhnya tekanan dari investor lain pada direktur untuk memaksimalkan kekayaan atas investasi yang ditanam. Akibatnya, direktur mengesampingkan keperluan manajerial dan melakukan apapun untuk memenuhi ekspektasi pasar. Perbaikan teknologi dilakukan untuk memudahkan pengaksesan informasi perusahaan dan memungkinkan peningkatan pada minat investor. Namun sayangnya, tindakan ini dianggap hanya melaporkan keuntungan jangka pendek saja dan bertentangan pada keberlanjutan jangka panjang perusahaan.

Pada akhirnya, kondisi-kondisi di atas menyadarkan berbagai pihak bahwa perusahaan seharusnya menyelaraskan kedua kepentingan tersebut yaitu memaksimalkan nilai pemegang saham dan meningkatkan insentif dan kesejahteraan para pemangku kepentingan perusahaan supaya termotivasi untuk membantu memaksimalkan *shareholders value*.

## **8.2 Urgensi Stakeholders dan Shareholders**

Dalam sebuah perusahaan terdapat pihak yang memegang peranan penting yaitu *shareholders* dan *stakeholders*. *Shareholders* sebagai pemegang saham merujuk pada individu perorangan, organisasi, atau perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham dalam bentuk ekuitas pada sebuah perusahaan atau organisasi publik

tertentu. Sedangkan *stakeholders* sebagai pemangku kepentingan merupakan semua individu yang memiliki kepentingan dan peran pada aktivitas dan pengambilan keputusan bisnis sebuah perusahaan, misalnya karyawan, konsumen, *supplier*, dan pihak-pihak lainnya.

Dulu dalam pandangan tradisional, manajer bisnis akan mengambil keputusan yang hanya meningkatkan kekayaan pihak manajerial perusahaan yaitu *stakeholders*. Dan dalam pandangan *shareholders* melihat bahwa tujuan utama manajemen adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham di mana tujuan ini berada di depan kepentingan pemangku kepentingan perusahaan lainnya, seperti karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat.

Namun seiring berjalannya waktu, dalam teori *stakeholders* dan teori *shareholders* yang disesuaikan menemukan bahwa perusahaan harus memaksimalkan nilai pemegang saham (*shareholders*) dengan tetap menjaga kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal ini didasarkan pada sebuah situasi di mana perusahaan dan pemegang saham terkadang memiliki tujuan lain yang bukan hanya didasarkan pada kinerja keuangan saja misalnya kebutuhan inovasi ide, kewirausahaan, membangun masyarakat atau investasi etis untuk sosial dan lingkungan. Lalu dalam menunjang keberlangsungan, pemangku kepentingan memerlukan pemegang saham dalam pengambilan keputusan bisnisnya. *Stakeholders* dalam orientasi *long-term* menjadi tokoh yang menjalankan kegiatan manajemen perusahaan sedangkan *shareholders* dalam orientasi *short-term* menjadi investor yang membantu permodalan yang digunakan dalam kegiatan manajemen tersebut. Ini berarti, keduanya tidak dapat berjalan secara parsial dan dalam menentukan strategi manajemen dan keberlangsungan,

memaksimalkan nilai keduanya menjadi sebuah keharusan (Chaudhry *et al.*, 2021; Freeman & McVea, 2005; Ward, 2020).

### **8.3 Peran *Environmental Disclosure* pada *Shareholders Value***

Dalam perubahan iklim yang ekstrem, kendala sumber daya alam, dan tekanan sosial-lingkungan lainnya, semakin mendorong keberlanjutan ke garis terdepan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk tidak hanya fokus mencari keuntungan yang besar tetapi juga memperhatikan lingkungan sekitar. Oleh karenanya pengungkapan lingkungan mengambil peran sebagai penyedia informasi kepada pihak eksternal tentang kebijakan, aktivitas, dan kinerja lingkungan perusahaan termasuk menjadi sumber wawasan yang penting dalam efisiensi dan efektivitas strategi keberlanjutan perusahaan.

Teori perusahaan yang dikenal saat ini menjelaskan bahwa setiap badan usaha didirikan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan guna meningkatkan kemakmuran para *shareholder* (Hardiyansah *et al.*, 2021). Lalu berkaitan dengan aspek lingkungan, kehadiran *environmental disclosure* mencakup masalah lingkungan dan pengaruhnya pada posisi dan kinerja bisnis di masa depan termasuk tentang ketidakpastian dan risiko, item material pengeluaran dan pendapatan, serta kebijakan lingkungan (Gerged *et al.*, 2021). Hal-hal tersebut tentu saja akan menarik bagi investor yang bukan hanya memiliki orientasi pada tingkat pengembalian namun juga niat untuk peduli pada lingkungan.

Pengungkapan lingkungan dengan kualitas tinggi memainkan peran simbolis sebagai bentuk transparansi perusahaan yang mengarah

pada peningkatan reputasi perusahaan. Cara investor memandang inisiatif lingkungan perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan penilaian mereka melalui reaksi mereka di pasar saham. Jika mereka berharap bahwa perusahaan dapat menciptakan nilai dengan menjadi pelaku lingkungan yang baik, mereka menanggapinya dengan menawar harga saham perusahaan tersebut. Dengan kata lain investor yang sadar akan lingkungan mendorong ekspektasi mereka pada peningkatan kinerja keuangan dan “*intangible value*” pada peningkatan kinerja lingkungan perusahaan (Yadav *et al.*, 2016). Perusahaan mengharapkan investor untuk bereaksi secara positif atas niat baik perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sehingga meningkatkan minat investor untuk menginvestasikan dananya di perusahaan (Khanifah *et al.*, 2020).

Berdasarkan diskusi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran kinerja dan pengungkapan lingkungan meningkatkan nilai pemegang saham bukan hanya pada orientasi pengembalian namun juga pada nilai tambah dari dampak terhadap lingkungan.

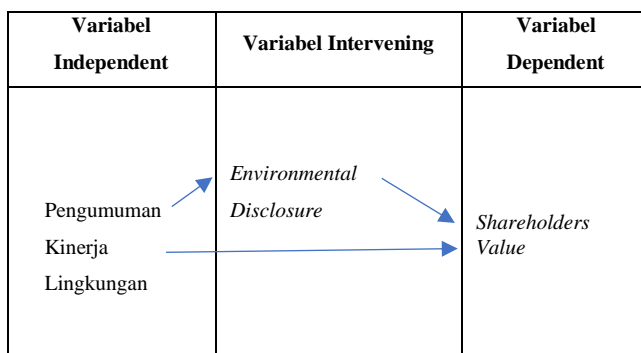
#### **8.4 Pendekatan *Research: Shareholders Value***

Pendekatan penelitian telah diadakan untuk menguraikan *shareholders value* dan telah dipublikasikan dalam Ifada *et al.* (2021). Sampel diambil menggunakan metode *purposive sampling* dengan berbagai kriteria, di antaranya merupakan perusahaan manufaktur yang mengikuti PROPER, menerbitkan laporan keuangan, dan mempublikasikan pengungkapan lingkungannya dalam *sustainability reporting*. Data diambil di Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan klasifikasi perusahaan manufaktur yang terdaftar pada



tahun 2017–2019. Berdasarkan metode *sampling* sebelumnya maka didapatkan sejumlah 81 perusahaan untuk penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara pengumuman kinerja lingkungan, *environmental disclosure*, dan *shareholders value*. Lalu, dari kajian literatur didapatkan model awal penelitian seperti pada tabel berikut.

**Tabel 14. Model awal penelitian *Shareholders Value***



Penelitian ini melibatkan tiga faktor penting yaitu pengumuman kinerja lingkungan sebagai variabel independen, *environmental disclosure* sebagai variabel intervening, dan *shareholders value* sebagai variabel dependen. Penelitian dilakukan untuk mengetahui tiga kondisi yaitu hubungan pengumuman kinerja lingkungan pada *environmental disclosure*; hubungan pengumuman kinerja lingkungan pada *shareholders value*; dan hubungan *environmental disclosure* pada *shareholders value*.

**Tabel 15. Model awal penelitian *Shareholders Value***

Variabel Independent	Variabel Intervening	Variabel Dependent
Pengumuman Kinerja Lingkungan	<i>Environmental Disclosure</i>	<i>Shareholders Value</i>

Setelah pengujian telah didapatkan model akhir penelitian seperti pada tabel di atas. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

Dalam hubungan pengumuman kinerja lingkungan dan *environmental disclosure*, telah ditemukan hubungan positif. Artinya ketika perusahaan mengumumkan kinerja lingkungan yang telah dilakukan dengan lebih luas dan lebih kredibel maka akan meningkatkan pengungkapan lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan kata lain, legitimasi akan dapat diraih karena kepercayaan publik meningkat. Hal tersebut akan mendukung keberlangsungan operasi perusahaan.

Dalam hubungan pengumuman kinerja lingkungan dan *shareholders value*, ditemukan hubungan yang tidak signifikan. Hubungan tidak signifikan tersebut dapat disebabkan dari sudut pandang *shareholders*, perusahaan dengan pengumuman kinerja lingkungan tinggi belum tentu menjamin kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang kepentingan. Hal ini karena dalam mengumumkan kinerja lingkungan, perusahaan akan mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan biaya.

Dalam hubungan *environmental disclosure* dan *shareholders value*, ditemukan hubungan positif dan menjadi variabel yang memediasi hubungan pengumuman kinerja lingkungan dengan *shareholders value*. Pengungkapan informasi tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dilakukan karena secara tidak langsung hal ini akan menjadi pertimbangan bagi investor dan kreditor terhadap kredibilitas perusahaan. pengungkapan ini menciptakan *value* tambahan bagi perusahaan di mata publik sehingga menunjang kesejahteraan *shareholder*. Selain itu, keberadaan pengungkapan dengan metode tertentu seperti EMA menyebabkan efisiensi perusahaan dalam menyeimbangkan pengeluaran biaya lingkungan dan kemampuan memperoleh profit. Kesimpulannya, tindakan perusahaan dalam mengumumkan kinerja lingkungannya menjadi langkah awal pengungkapan. Kemudian pengungkapan yang efektif mendorong terciptanya *shareholders value*.

## **8.5 Penutup**

Teori *shareholder* merujuk pada teori yang mengharapkan perusahaan untuk mengutamakan kepentingan para pemegang saham. Namun demikian, perusahaan tetap dihadapkan pada kondisi untuk menyeimbangkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* di mana *shareholders* sebagai pihak investor yang memodali jalannya bisnis perusahaan dan *stakeholders* sebagai pemangku kepentingan dalam manajerial bisnis. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan nilai yang diberikan kepada *shareholders* melalui pengembalian deviden dan kenaikan harga pasar serta kenaikan insentif dan kesejahteraan bagi para *stakeholders*.

Keberlanjutan perusahaan saat ini dinilai melalui kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan yang dimiliki. Dalam konteks lingkungan, *environmental disclosure* mengambil peran penting sebagai bentuk transparansi dan meningkatkan reputasi perusahaan di depan para pemegang saham. Bab ini telah mengkonfirmasi hubungan antara pengumuman kinerja lingkungan, *environmental disclosure*, dan *shareholders value*. Dari hasil penelitian didapatkan penunjang *environmental disclosure* yaitu pengumuman kinerja lingkungan kemudian dampak dari *environmental disclosure* yaitu *shareholders value*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adyaksana, R. I., Putri, A. Z., & Saputra, E. T. (2022). Do environmental costs and environmental information disclosure effect on environmental performance? *Journal of Business and Information Systems*, 4(1), 14–20.
- Al-Naser, K. H. Y., Riyadh, H. A., & Albalaki, F. M. M. (2021). The impact of environmental and social costs disclosure on financial performance mediating by earning management. *Journal of Cases on Information Technology*, 23(2), 50–64. <https://doi.org/10.4018/JCIT.20210401.oa5>
- Alshbili, I., Elamer, A. A., & Beddewela, E. (2020). Ownership types, corporate governance and corporate social responsibility disclosures: Empirical evidence from a developing country. *Accounting Research Journal*, 33(1), 148–166. <https://doi.org/10.1108/ARJ-03-2018-0060>
- Amosh, H. Al, & Mansor, N. (2020). The Implications of Ownership Structure on the Environmental Disclosure in Jordan. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(3). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i3/7054>
- Angelina, M., & Nursasi, E. (2021). Pengaruh Penerapan Green Accounting Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(2), 211.
- Bag, S., & Omrane, A. (2022). Corporate Social Responsibility and Its Overall Effects on Financial Performance: Empirical Evidence from Indian Companies. *Journal of African Business*, 23(1), 264–280. <https://doi.org/10.1080/15228916.2020.1826884>

- Burritt, R. L., Hahn, T., & Schaltegger, S. T. (2002). Towards a comprehensive framework for environmental management accounting - Links between business actors and environmental management accounting tools. *Australian Accounting Review*, *12*(27), 39–50. <https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2002.tb00202.x>
- Burritt, R. L., Hahn, T., & Schaltegger, S. (2005). An Integrative Framework of Environmental Management Accounting—Consolidating the Different Approaches of EMA into a Common Framework and Terminology. *Environmental Management Accounting: Informational and Institutional Developments*, 21–35. [https://doi.org/10.1007/0-306-48022-0\\_2](https://doi.org/10.1007/0-306-48022-0_2)
- Chaudhry, A. A., Ramakrishnan, S., Sulimany, H. G. H., & Sharif, A. (2021). Enhancing Shareholder Value through Corporate Social Responsibility Disclosure in a Developing Country. *Estudios de Economia Aplicada*, *39*(4), 1–9. <https://doi.org/10.25115/eea.v39i4.4315>
- Chu, S. H., Yang, H., Lee, M., & Park, S. (2017). The impact of institutional pressures on green supply chain management and firm performance: Top management roles and social capital. *Sustainability (Switzerland)*, *9*(5). <https://doi.org/10.3390/su9050764>
- DPR RI, P. K. A. (2022). Meninjau Daya Saing Digital Indonesia Pengelolaan Limbah Medis pada Pandemi Covid-19 Kelangkaan Solar : Penyebab dan Dampaknya Kelangkaan Solar : Penyebab dan Dampaknya. In *Buletin APBN: Vol. VII (Issue April)*.

- Falope, F. J., Offor, N. T., & Ofurum, D. I. (2019). Environmental cost disclosure and corporate performance of quoted construction firms in Nigeria. *International Journal of Advanced Academic Research / Social and Management Sciences* , 5(8), 2488–9849.
- Farhan, A., & Freihat, A. R. F. (2021). The Impact of Government Ownership and Corporate Governance on the Corporate Social Responsibility: Evidence from UAE. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 851–861. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.851>
- Fatihudin, D., Jusni, & Mochklas, M. (2018). How measuring financial performance. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(6), 553–557.
- Fauzi, I. Della, & Rukmini, R. (2018). The Effect of Financial Performance Measured With Rentability Ratio Against Dividend Payout Ratio (Empirical Study on Manufacturing Companies Group Listed on BEI). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2(01), 19–33. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v2i01.228>
- Fauzi, T. H. (2022). The Effect of Environmental Performance on Firm Value with Mediating Role of Financial Performance in Manufacturing Companies in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(3), 256–265. <https://doi.org/10.36941/AJIS-2022-0071>
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2005). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal*, January. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>

- Galant, A., & Cvek, D. (2021). the Effect of Environmental Performance Investments on Financial Performance: Analysis of Croatian Companies. *Central European Business Review*, 10(5), 37–51. <https://doi.org/10.18267/j.cebr.271>
- Gerged, A. M., Beddewela, E., & Cowton, C. J. (2021). Is corporate environmental disclosure associated with firm value? A multicountry study of Gulf Cooperation Council firms. *Business Strategy and the Environment*, 30(1), 185–203. <https://doi.org/10.1002/bse.2616>
- Gerged, A. M. (2021). Factors affecting corporate environmental disclosure in emerging markets: The role of corporate governance structures. *Business Strategy and the Environment*, 30(1), 609–629. <https://doi.org/10.1002/bse.2642>
- Giannarakis, G., Andronikidis, A., & Sariannidis, N. (2020). Determinants of environmental disclosure: investigating new and conventional corporate governance characteristics. *Annals of Operations Research*, 294(1–2), 87–105. <https://doi.org/10.1007/s10479-019-03323-x>
- Gibassier, D., & Alcouffe, S. (2018). Environmental Management Accounting: The Missing Link to Sustainability? *Social and Environmental Accountability Journal*, 38(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/0969160X.2018.1437057>
- Goel, P. (2018). Implications of corporate governance on financial performance: an analytical review of governance and social reporting reforms in India. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 3(1). <https://doi.org/10.1186/s41180-018-0020-4>



- Hardiyansah, M., Agustini, A. T., & Purnamawati, I. (2021). The Effect of Carbon Emission Disclosure on Firm Value: Environmental Performance and Industrial Type. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 123–133. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.123>
- Hart, S. (1995). A Natural-Resources Based View of the Firm. *Academy of Management Review*, 51(3), 49–51.
- Hart, S. L., & Dowell, G. (2011). A natural-resource-based view of the firm: Fifteen years after. *Journal of Management*, 37(5), 1464–1479. <https://doi.org/10.1177/0149206310390219>
- Ichsan, I., Silvia, I., Mahdawi, M., & Syamni, G. (2021). the Financial Performance of Manufacturing Companies in Idx and Some Factors That Influence. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 19(2), 354–362. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2021.019.02.11>
- Ifada, L. M., Indriastuti, M., Ibrani, E. Y., & Setiawanta, Y. (2021). Environmental Performance and Environmental Disclosure: The Role of Financial Performance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 349–362. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0349>
- Ifada, L. M., Munawaroh, Kartika, I., & Fuad, K. (2021). Environmental Performance Announcement and Shareholder Value: The Role of Environmental Disclosure. In *Lecture Notes in Networks and Systems* (Vol. 278). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-79725-6\\_42](https://doi.org/10.1007/978-3-030-79725-6_42)

- Ifada, L. M., & Indriastuti, M. (2021). Government Ownership, International Operations, Board Independence and Environmental Disclosure: Evidence from Asia–Pacific. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(2), 131–147. <https://doi.org/10.15294/jda.v13i2.30268>
- Ifada, L. M., & Saleh, N. M. (2022). Environmental performance and environmental disclosure relationship: the moderating effects of environmental cost disclosure in emerging Asian countries. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 33(6). <https://doi.org/10.1108/MEQ-09-2021-0233>
- Ismail, A. H., Abdul Rahman, A., & Hezabr, A. A. (2018). Determinants of corporate environmental disclosure quality of oil and gas industry in developing countries. In *International Journal of Ethics and Systems* (Vol. 34, Issue 4). <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2018-0042>
- Jasch, C. (2003). The use of Environmental Management Accounting (EMA) for identifying environmental costs. *Journal of Cleaner Production*, 11(6), 667–676. [https://doi.org/10.1016/S0959-6526\(02\)00107-5](https://doi.org/10.1016/S0959-6526(02)00107-5)
- Jeroh, E. (2020). An assessment of the internal determinants of the environmental disclosure practices of firms across sub-saharan africa. *Economic Horizons*, 22(1), 43–54. <https://doi.org/10.5937/ekonhor2001047J>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). Status Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020. In *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*.

- Khanifah, K., Udin, U., Hadi, N., & Alfiana, F. (2020). Environmental performance and firm value: Testing the role of firm reputation in emerging countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, *10*(1), 96–103. <https://doi.org/10.32479/ijeep.8490>
- Kilincarslan, E., Elmagrhi, M. H., & Li, Z. (2020). Impact of governance structures on environmental disclosures in the Middle East and Africa. *Corporate Governance (Bingley)*, *20*(4), 739–763. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2019-0250>
- Kong, Y., Javed, F., Sultan, J., Hanif, M. S., & Khan, N. (2022). EMA Implementation and Corporate Environmental Firm Performance: A Comparison of Institutional Pressures and Environmental Uncertainty. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(9). <https://doi.org/10.3390/su14095662>
- Kraus, S., Rehman, S. U., & García, F. J. S. (2020). Corporate social responsibility and environmental performance: The mediating role of environmental strategy and green innovation. *Technological Forecasting and Social Change*, *160*(July), 120262. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120262>
- Latan, H., Chiappetta Jabbour, C. J., Lopes de Sousa Jabbour, A. B., Wamba, S. F., & Shahbaz, M. (2018). Effects of environmental strategy, environmental uncertainty and top management's commitment on corporate environmental performance: The role of environmental management accounting. *Journal of Cleaner Production*, *180*, 297–306. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.106>

- Le Thi Kim, N., Duvernay, D., & Le Thanh, H. (2021). Determinants of financial performance of listed firms manufacturing food products in Vietnam: regression analysis and Blinder–Oaxaca decomposition analysis. *Journal of Economics and Development*, 23(3), 267–283. <https://doi.org/10.1108/jed-09-2020-0130>
- Lee, D., Fu, Y., Zhou, D., Nie, T., & Song, Z. (2022). Is There a Missing Link? Exploring the Effects of Institutional Pressures on Environmental Performance in the Chinese Construction Industry. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(18). <https://doi.org/10.3390/ijerph191811787>
- Lu, L. W., & Taylor, M. E. (2018). A study of the relationships among environmental performance, environmental disclosure, and financial performance. *Asian Review of Accounting*, 26(1), 107–130. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2016-0010>
- Masud, M. A. K., Nurunnabi, M., & Bae, S. M. (2018). The effects of corporate governance on environmental sustainability reporting: empirical evidence from South Asian countries. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 3(1). <https://doi.org/10.1186/s41180-018-0019-x>
- Maulana, A., Ruchjana, T. E., & Nurdiansyah, D. H. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan kinerja lingkungan terhadap environmental disclosure. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(2), 787–800.
- Munifatussa'idah, A. (2019). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital, and Earning Management toward Financial Performance in Indonesia Islamic Banks. *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 14(2), 251–279.

- Mutmainah, M., & Indrasari, A. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris dan Leverage Terhadap Environmental Disclosure. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 47–56. <https://doi.org/10.18196/rab.010105>
- Negash, M., & Lemma, T. T. (2020). Institutional pressures and the accounting and reporting of environmental liabilities. *Business Strategy and the Environment*, 29(5), 1941–1960. <https://doi.org/10.1002/bse.2480>
- Nyahuna, T. (2022). The Choice of Environmental Management Accounting Practices Adopted by Managers: Evidence from the Hotel Sector in KwaZulu Natal, South Africa. *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI)*, 3(2), 154–158. <https://doi.org/10.47540/ijsei.v3i2.618>
- Odoemelum, N., & Okafor, R. (2018). The Influence of Corporate Governance on Environmental Disclosure of Listed Non-Financial Firms in Nigeria. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.28992/ijSAM.v2i1.47>
- Ofoegbu, G. N., Odoemelum, N., & Okafor, R. G. (2018). Corporate board characteristics and environmental disclosure quantity: Evidence from South Africa (integrated reporting) and Nigeria (traditional reporting). *Cogent Business and Management*, 5(1), 1–27. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1551510>
- Ong, S. Y. Y., Janudin, S. E., Habidin, N. F., & Fuzi, N. M. (2019). Environmental management accounting practices, environmental management system and environmental performance for the Malaysian manufacturing industry. *International Journal of Business Excellence*, 18(1), 120. <https://doi.org/10.1504/ijbex.2019.10020908>

- Oshiole, S., Elamah, A. F., & Amahalu, N. N. (2020). Effect of Environmental Cost Disclosure on Profitability of Listed Oil and Gas Firms in Nigeria. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(2), 157–170. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v10-i2/7405>
- Pelu, M. F. A. R., Tenriwaru, T., Saira, G. M., & Muslim, M. (2022). Implementasi Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Lingkungan dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Intervening. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 49–58. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1401>
- Pham, H. T. T., Jung, S. C., & Lee, S. Y. (2020). Governmental ownership of voluntary sustainability information disclosure in an emerging economy: Evidence from Vietnam. *Sustainability (Switzerland)*, 12(16). <https://doi.org/10.3390/su12166686>
- Rahmatika, D. N. (2021). Exploring the relation of environmental disclosure, environmental performance and company characteristics in Indonesia: An Empirical Analysis. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 4(1), 1–23.
- Rakos, I. S., & Antohe, A. (2014). Environmental Cost - An Environment Management Accounting Component. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 4(4), 166–175. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v4-i4/1302>
- Rini, R. K., & Adhariani, D. (2021). Does Financial Performance Drive Environmental Disclosure and Environmental Cost? Evidence from Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 317. <https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i02.p09>

- Saeed, A., Jun, Y., Nubuor, S. A., RasikaPriyankara, H. P., & Jayasuriya, M. P. F. (2018). Institutional pressures, green supply chain management practices on environmental and economic performance: A two theory view. *Sustainability (Switzerland)*, *10*(5), 1–24. <https://doi.org/10.3390/su10051517>
- Sandamini, N., Business, K. D.-I., & 2022, undefined. (2022). Environmental Management Accounting Practices for the Sustainable Development Change: A Case Study from a Sri Lankan Rubber Manufacturing Company. *Journal.Stebilampung.Ac.Id*, *6*(2), 116–125. <https://journal.stebilampung.ac.id/index.php/ibarj/article/view/246>
- Shil, N., & Iqbal, M. (2005). Environmental disclosure – a Bangladesh perspective. *The Cost and Management*, *Vol. 3*(July – August 2005), 85–93.
- Wang, S., Wang, H., & Wang, J. (2019). Exploring the effects of institutional pressures on the implementation of environmental management accounting: Do top management support and perceived benefit work? *Business Strategy and the Environment*, *28*(1), 233–243. <https://doi.org/10.1002/bse.2252>
- Ward, A. (2020). Encyclopedia of Sustainable Management. *Encyclopedia of Sustainable Management*, August. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4>
- Wongthongchai, J., & Saenchaiyathon, K. (2019). The key role of institution pressure on green supply chain practice and the firm's performance. *Journal of Industrial Engineering and Management*, *12*(3), 432–446. <https://doi.org/10.3926/jiem.2994>

- Xiaomei, L. (2004). Theory and practice of environmental management accounting. *International Journal of Technology Management & Sustainable Development*, 3(1), 47–57. <https://doi.org/10.1386/ijtm.3.1.47/0>
- Yadav, P. L., Han, S. H., & Rho, J. J. (2016). Impact of Environmental Performance on Firm Value for Sustainable Investment: Evidence from Large US Firms. *Business Strategy and the Environment*, 25(6), 402–420. <https://doi.org/10.1002/bse.1883>



## GLOSARIUM

**Dewan komisaris independen** adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi.

**Dewan Pengawas Syariah** (DPS) merupakan dewan yang bertugas mengawasi dan memberikan saran kepada pengelola tentang implementasi prinsip-prinsip dalam aktivitas operasional lembaga sekaligus menjadi wakil dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) pada industri keuangan syariah di Indonesia.

***Entrenchment effect*** artinya suatu efek di mana seorang pemegang saham menggunakan hak kontrolnya untuk tujuan pribadi.

***Environmental Cost Disclosure*** (ECD) merupakan analisis informasi keuangan dan non-keuangan untuk mendukung proses pengelolaan lingkungan internal.

***Environmental Disclosure*** adalah pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan dalam laporan tahunan perusahaan yang menjelaskan mengenai interaksi antara aktivitas bisnis perusahaan dengan lingkungan fisik dan sosialnya termasuk tanggung jawab pada dampak bisnis yang ditimbulkan.

***Environmental Management Accounting*** (EMA) atau akuntansi manajemen lingkungan merupakan isu yang mendorong kebutuhan para manajer tentang bagaimana memperoleh informasi lingkungan dan menyebabkan pengembangan instrumen keputusan baru.

**Institutional atau kelembagaan** merupakan sebuah proses di mana organisasi atau aktor individu memperoleh dan memelihara seperangkat makna, keyakinan, praktik, dan nilai-nilai yang jika digabungkan, cenderung mengarah pada keragaman perilaku.

***Institutional pressure*** adalah kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan yang harus dicapai suatu lembaga/perusahaan saat menghadapi tekanan institutional yang datang.

**Kinerja keuangan** berkaitan dengan penilaian kuantitatif terkait omset, pertumbuhan penjualan, dan pendapatan dari periode tertentu pada suatu perusahaan.

**Kinerja lingkungan** termasuk dalam menjaga lingkungan alam sekitar di mana perusahaan tersebut beroperasi sehingga kelestarian lingkungan dapat memberikan manfaat untuk generasi mendatang.

**Kinerja non-keuangan** berhubungan dengan kualitas yang dihasilkan seperti tingkat kepuasan pelanggan atau kinerja karyawan pada suatu perusahaan.

**Lingkungan hidup** adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik.

***Shareholder*** atau pemegang saham adalah pihak yang memiliki saham pada suatu perusahaan.

***Stakeholder*** yaitu orang atau kelompok yang memiliki dan menuntut kepemilikan, hak atau kepentingan dari sebuah perusahaan dan aktivitasnya, di masa lalu, sekarang atau di masa depan.

**Tata kelola** adalah seperangkat sistem, proses, aturan, dan kebijakan yang mengatur pengelolaan dan hubungan antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencapaian tujuan perusahaan.

**Variabel dependen** adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen.

**Variabel independen** adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan/timbulnya variabel dependen.

**Variabel intervening** adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur.

**Variabel moderating** adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen.

## INDEX

---

### **B**

*Bloomberg* · 72  
BUMN · 43, 50

---

### **D**

degradasi lingkungan · i, v, 2, 27, 63, 76  
dewan komisaris independen · 19, 20, 21

---

### **E**

*Environmental Cost Disclosure* · 23, 24, 25, 27, 96, 105  
*Environmental Disclosure* · iii, 3, 9, 16, 19, 20, 27, 28, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 45, 48, 61, 62, 72, 81, 83, 84, 87, 91, 92, 95, 96  
*Environmental Management Accounting* · iii, 25, 30, 52, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 69, 72, 73, 88, 90, 92, 95, 97, 105

---

### **F**

finansialisasi pasar · 78

---

### **I**

independensi dewan · 37, 47, 48, 49, 51, 72, 74, 75, 76  
*institutional pressure* · 65, 66

---

### **K**

kepemilikan pemerintah · 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 72  
keterlibatan pemerintah · 47  
kinerja keuangan · 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 60, 63, 76, 80, 82, 86  
kinerja lingkungan · 2, 5, 6, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 94  
koersif · 46, 67, 70, 73, 74, 76, 77

---

### **L**

*leverage* · 72, 74, 94  
lingkungan ekonomi · 78

---

### **M**

manajemen puncak · 10, 11, 68  
mimetik · 67, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 77  
*Monetary Environmental Information* · 55

---

### **N**

normatif · 67, 70, 73, 74, 75, 76, 77

---

### **O**

operasi internasional · 47, 48, 49, 51, 72

---

## **P**

Pendekatan *Research* · 19, 28, 38, 47,  
61, 72, 82  
pengumuman kinerja lingkungan · 83,  
84, 86  
permintaan pelanggan · 69  
pesaing · 8, 68, 71, 77  
*Physical Environmental Information* ·  
55  
profitabilitas · 16, 17, 18, 19, 21, 22,  
23, 40, 41, 63, 75, 94  
PROPER · 5, 19, 43, 50, 82

---

## **S**

*shareholder* · 24, 81, 85  
*shareholders* · 32, 36, 78, 79, 80, 82,  
83, 84, 85, 86  
sistem pengendalian · 59, 64  
*stakeholder* · 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 18,  
19, 21, 24, 28, 31

*stakeholders* · 8, 32, 79, 80, 85  
strategi lingkungan · 9, 59, 64, 69  
struktur bisnis · 78  
*sustainable* · 16, 42

---

## **T**

tata kelola · 4, 32, 34, 35, 36, 37, 38,  
39, 40, 42, 47  
tekanan institutional · 65, 71  
teori agensi · 6  
Teori berbasis sumber daya alam · 9  
teori kelembagaan · 65, 67, 68  
teori legitimasi · 6, 16

---

## **U**

ukuran perusahaan · 19, 20, 21, 22,  
53, 94  
urgensi · 9

## TENTANG PENULIS



**Dr. Luluk Muhimatul Ifada, SE., M.Si, Akt., CSRS., CSRA,** adalah dosen dan peneliti Program Studi Magister Akuntansi, Sarjana Akuntansi dan D3 Akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis mengambil konsentrasi pada penelitian di bidang Akuntansi Manajemen

Lingkungan. Hingga saat ini, penulis telah menghasilkan berbagai tulisan yang telah dipublikasikan, baik buku cetak, artikel penelitian, maupun seminar. Tulisan-tulisan tersebut telah dipublikasikan secara nasional maupun internasional, dan didedikasikan untuk menggali isu-isu krusial yang terkait dengan Akuntansi Manajemen Lingkungan.